

**PENYELESAIAN SP2DK ATAS DATA PEMBELIAN YANG
BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN BADAN DAN
SPT MASA PPN PADA PT X
(STUDI KASUS KLIEN KKP PASAGUNG)**

TUGAS AKHIR



Oleh :

Eka Syafira Putri

152110713078

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

**PENYELESAIAN SP2DK ATAS DATA PEMBELIAN YANG
BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN BADAN DAN
SPT MASA PPN PADA PT X
(STUDI KASUS KLIEN KKP PASAGUNG)**

TUGAS AKHIR



Oleh :

Eka Syafira Putri

152110713078

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2024**

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 6 Mei 2024

Penulis



Eka Syafira Putri

152110713078

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PENYELESAIAN SP2DK ATAS DATA PEMBELIAN YANG BELUM
DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN BADAN DAN SPT MASA PPN
PADA PT X
(STUDI KASUS KLIEN KKP PASAGUNG)

Disusun oleh:
Eka Syafira Putri
152110713078

Telah disetujui dan diterima dengan baik
Koordinator Program Studi D-III Perpajakan



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A.

NIP. 1992091820190831008

Dosen Pembimbing



Izmi Dwijra Eriani, S.A., M.A.

NIP. 199402082020013201

Pimpinan

KKP Pasagung



**PT. PASAGUNG
PRIMA SOLUTIONS**



Ali Yus Isman, S.E., M.A., B.K.P.

Tanggal, 04 Juli 2024

Tanggal, 03 Juni 2024

Tanggal, 31 Mei 2024

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir yang berjudul “Penyelesaian SP2DK atas data yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PPN pada PT X (Studi Kasus Klien KKP Pasagung)” dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Diploma III Program Studi Perpajakan Universitas Airlangga Surabaya.

Laporan Tugas Akhir ini terselesaikan oleh banyak pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Magang diantaranya:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan selama proses penyelesaian penulisan praktik kerja lapangan ini berlangsung.
2. Bapak Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M. Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Bapak Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A, selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan informasi kegiatan perkuliahan.
4. Ibu Izmi Dwira Eriani, S.A., M.A., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan kepada penulis selama 3 tahun perkuliahan serta dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.
5. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
6. Bapak Ali Yus Isman, S.E., M.A., B.K.P. selaku direktur KKP Pasagung yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan Magang.
7. Mbak Fauzia, Mbak Mentari, Mbak Dita, Mbak Ria, Mas Putra, Mbak Mila, dan Bu Ana selaku staff KKP Pasagung yang telah membantu serta memberikan pengalaman yang kelak berguna di dunia kerja. Terima kasih atas ilmu yang diberikan selama mengikuti Magang.

8. Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa serta dukungan baik secara moral maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
9. Kepada teman dekat penulis selama perkuliahan, para Staff Kemenkeu yaitu Riska, Fia, Amel, Ayu, dan Muti yang memberikan penulis cerita dan warna selama tiga tahun perkuliahan, memberikan semangat, dukungan serta motivasi.
10. Devi dan Puan selaku teman seperjuangan magang yang saling memberikan dukungan dan bantuan satu sama lain.
11. Seluruh teman Perpajakan Angkatan 2021 yang telah memberikan banyak kenangan dan cerita selama perkuliahan.
12. Kepada orang – orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah membantu penulis untuk dapat melalui masa penyusunan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis memohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan pada penulisan Tugas Akhir ini. Dengan segala keterbatasan, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan kelak di kemudian hari.

Surabaya,



Eka Syafira Putri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terbitnya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterima dan upaya penyelesaian SP2DK yang diterima PT X pada 2 Desember 2022. Objek penelitian ini adalah PT X yang berkedudukan di Kabupaten Sidorjo, Jawa Timur. PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pedagang eceran makanan dan telah dikukuhkan menjadi PKP sejak tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis, pada lampiran SP2DK terdapat data pembelian yang belum dilaporkan oleh PT X pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan tahun 2019. Kelalaian ini menyebabkan diterbitkannya SP2DK oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sehingga, berdasarkan hal tersebut, maka PT X melakukan konfirmasi atas permasalahan tersebut melalui surat tanggapan pada tanggal 12 Desember 2022. PT X wajib melakukan pembetulan baik pada SPT Masa PPN maupun SPT Tahunan Badan tahun 2019. Atas pembetulan tersebut menimbulkan kurang bayar pada SPT Masa PPN sebesar Rp 72.140.002 dan SPT Tahunan Badan sebesar Rp 9.380.448 yang telah disetor pada tanggal 29 Mei 2023. Selain itu PT X menerima sanksi bunga atas kekurangan utang pajak akibat pembetulan yang dilakukan berupa Surat Tagihan Pajak (STP). Besaran STP yang telah dibayarkan pada tanggal 2 Agustus 2023 untuk SPT Masa PPN adalah Rp 17.140.459 dan SPT Tahunan Badan adalah Rp 2.215.899. Di masa yang akan datang, diharapkan PT X melakukan rekapitulasi setiap akhir bulan untuk menghindari kesalahan yang serupa.

Kata Kunci : SP2DK, Surat Tagihan Pajak, PPN, SPT Pembetulan

ABSTRACT

This study aims to identify the causes behind the issuance of the Request for Clarification of Data and/or Information (SP2DK) received and the resolution efforts for the SP2DK received by PT X in December 2022. The subject of this research is PT X, located in Sidoarjo Regency, East Java. PT X is a company engaged in the retail food trade and has been recognized as a Taxable Entrepreneur (PKP) since 2018. The method used in this research is qualitative with a case study approach. The analysis results show that the SP2DK attachment contained purchase data that PT X had not reported in the VAT Periodic Tax Return and the Annual Corporate Income Tax Return for 2019. This negligence led to the issuance of the SP2DK by the Directorate General of Taxes (DJP). Consequently, PT X confirmed the issue through a response letter on December 12, 2022. PT X is required to make corrections to both the VAT Periodic Tax Return and the Annual Corporate Income Tax Return for 2019. These corrections resulted in underpayments of Rp 72.140.002 for the VAT Periodic Tax Return and Rp 9.380.448 for the Annual Corporate Income Tax Return, which were paid on May 29, 2023. Additionally, PT X received interest penalties for the tax underpayments due to the corrections made, in the form of a Tax Collection Letter (STP). The amount of STP paid on August 2, 2023, was Rp 17.140.459 for the VAT Periodic Tax Return and Rp 2.215.899 for the Annual Corporate Income Tax Return. In the future, it is hoped that PT X will perform monthly recapitulations to avoid similar errors.

Keywords : SP2DK, Tax Collection Letter, VAT, Amended Tax Return.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Dasar Hukum.....	5
2.2 Pajak Penghasilan (PPh).....	5
2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan	6
2.2.2 Objek Pajak Penghasilan	6
2.3 Pajak Pertambahan Nilai	7
2.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	8
2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai	8
2.3.3 Faktur Pajak	9
2.3.4 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	9
2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)	9
2.4.1 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan	10
2.4.2 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	11
2.5 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).....	11

BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	14
3.1 Objek	14
3.2 Waktu.....	14
3.3 Metode Kajian	14
BAB 4 PEMBAHASAN	16
4.1 Hasil Pelaksanaan	16
4.2 Pembahasan	17
4.2.1 Penyebab Penerbitan SP2DK.....	17
4.2.2 Penyelesaian SP2DK atas Data Pembelian yang Belum Dilaporkan ...	18
4.3 Solusi	25
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	27
5.1 Kesimpulan.....	27
5.2 Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Pembelian yang Belum Dilaporkan Lampiran SP2DK	17
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Data Pembelian yang Belum Dilaporkan	19
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Faktur Masukan SPT Masa PPN 2019 Normal.....	20
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Perhitungan Faktur Masukan SPT Masa PPN 2019.....	21
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Perhitungan Faktur Keluaran SPT Masa PPN 2019.....	22
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Pembetulan SPT Masa PPN 2019	23
Tabel 4. 7 Perhitungan Kurang Bayar SPT Masa PPN 2019	23
Tabel 4. 8 Laporan Laba Rugi Normal dan Pembetulan.....	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Faktur Batal	18
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.....	30
Lampiran 2 SPT Masa PPN Januari 2019 Normal.....	32
Lampiran 3 SPT Masa PPN Januari 2019 Pembetulan.....	33
Lampiran 4 SPT Masa PPN Februari 2019 Normal.....	34
Lampiran 5 SPT Masa PPN Februari 2019 Pembetulan.....	35
Lampiran 6 SPT Masa PPN Maret 2019 Normal.....	36
Lampiran 7 SPT Masa PPN Maret 2019 Pembetulan.....	37
Lampiran 8 SPT Masa PPN April 2019 Normal.....	38
Lampiran 9 SPT Masa PPN April 2019 Pembetulan.....	39
Lampiran 10 SPT Masa PPN Mei 2019 Normal.....	40
Lampiran 11 SPT Masa PPN Mei 2019 Pembetulan.....	41
Lampiran 12 SPT Masa PPN Juni 2019 Normal.....	42
Lampiran 13 SPT Masa PPN Juni 2019 Pembetulan.....	43
Lampiran 14 SPT Masa PPN Juli 2019 Normal.....	44
Lampiran 15 SPT Masa PPN Juli 2019 Pembetulan.....	45
Lampiran 16 SPT Masa PPN Agustus 2019 Normal.....	46
Lampiran 17 SPT Masa PPN September 2019 Normal.....	47
Lampiran 18 SPT Masa PPN Oktober 2019 Normal.....	48
Lampiran 19 SPT Masa PPN Oktober 2019 Pembetulan.....	49
Lampiran 20 SPT Masa PPN November 2019 Normal.....	50
Lampiran 21 SPT Masa PPN Desember 2019 Normal.....	51
Lampiran 22 SPT Tahunan Badan 2019 Normal Induk.....	52
Lampiran 23 SPT Tahunan Badan 2019 Normal Lampiran HPP.....	53
Lampiran 24 SPT Tahunan Badan 2019 Induk Pembetulan.....	54
Lampiran 25 SPT Tahunan Badan 2019 Pembetulan Lampiran HPP.....	55
Lampiran 26 Rincian Data Pembelian yang Belum Dilaporkan dari SP2DK.....	56
Lampiran 27 Rincian Data Pembelian yang Belum Dilaporkan dari WP.....	57
Lampiran 28 Surat Tagihan Pajak SPT Masa PPN tahun 2019.....	58
Lampiran 29 Surat Tagihan Pajak SPT Tahunan Badan tahun 2019.....	62

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai pilar utama dalam sistem keuangan negara, memainkan peran krusial dalam pembangunan dan memberikan layanan publik. Selain menjadi sumber pendapatan negara, pajak berfungsi sebagai alat pengendali perilaku ekonomi, meminimalkan terjadinya ketidaksetaraan, dan merancang kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

Pajak di Indonesia memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh lembaga pemungut pajaknya. Pada dasarnya pajak di Indonesia terbagi menjadi dua kategori berdasarkan pengelolaannya. Kategori pertama adalah pajak pusat yang pajaknya dipungut oleh negara atau pemerintah pusat dan dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan sebagainya. Sedangkan untuk kategori selanjutnya yaitu pajak daerah yang pajak pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) , Pajak Hotel dan Restoran, dan masih banyak lagi.

Sistem pemungutan pajak adalah suatu mekanisme untuk menghitung jumlah pajak yang harus disetor oleh wajib pajak kepada negara. Pemberlakuan sistem pemungutan pajak menggunakan *self assessment* menjadi suatu ciri khas di Indonesia. *Self assesment system* adalah sistem administrasi pajak yang dimana Wajib Pajak memiliki tanggung jawab utama untuk menghitung, membayar dan melaporkan secara mandiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan

umum dan prosedur perpajakan di Indonesia (Halim, 2020). Dengan adanya metode *self assesment system* dapat mempermudah dan memberikan fleksibilitas bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa setiap Wajib Pajak (WP) wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kesediaan Wajib Pajak untuk patuh dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Namun terjadinya risiko kesalahan yang terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan atau kesalahan dalam proses perhitungan sering dijumpai pada dunia nyata. Kurangnya sosialisasi terkait perpajakan merupakan penyebab utama atas permasalahan tersebut.

Pada saat wajib pajak lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakan maka akan dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi. Kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara nilai pajak yang dilaporkan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, dapat menjadi landasan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan Wajib Pajak.

SP2DK adalah surat yang dikeluarkan langsung oleh KPP untuk meminta penjelasan dalam bentuk data atau keterangan dari perusahaan yang diduga belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. KPP akan menerbitkan SP2DK apabila terdapat ketidaksesuaian antara data, informasi, atau informasi perpajakan dengan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Tindakan ini berpotensi mengakibatkan DJP melakukan pemeriksaan terhadap WP guna mengevaluasi kepatuhan WP terhadap peraturan perpajakan dan akurasi pelaporan pajak.

PT X merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor Perdagangan Eceran Makanan dan telah diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak bulan Agustus tahun 2018. Kasus ini bermula saat PT X menerima SP2DK dari KPP Sidoarjo Selatan pada Desember 2022. SP2DK tersebut diterima karena terdapat indikasi belum dilaporkannya data pembelian pada SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PPN. Wajib pajak diberikan waktu untuk menanggapi SP2DK baik secara langsung maupun tertulis paling lambat 14 hari kerja setelah surat diterima. Tanggapan secara tertulis dapat dilakukan dengan menyampaikan penjelasan tertulis dengan mengakui ataupun menyanggah serta disertai bukti atau data pendukung yang jelas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan ini. Penyampaian pernyataan yang tidak benar dapat mengakibatkan PT X dikenai sanksi administrasi. Sehingga, penulis memutuskan untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul “Penyelesaian SP2DK atas Data yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan dan SPT Masa PPN Pada PT X (Studi Kasus Klien KKP Pasagung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari Tugas Akhir ini diantaranya yaitu :

1. Apa penyebab penerbitan SP2DK oleh KPP pada PT X?
2. Apa upaya yang perlu dilakukan PT X dalam penyelesaian SP2DK atas ditemukannya data pembelian yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PPN?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penyusunan Tugas Akhir sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terbitnya SP2DK oleh KPP pada PT X.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT X dalam penyelesaian SP2DK atas ditemukannya data pembelian yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PPN.

1.4 Manfaat

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini tentu memiliki manfaat, diantaranya yaitu :

1. Mampu menerapkan pengetahuan perpajakan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan.
2. Sebagai referensi untuk dijadikan acuan bagi penulis maupun pembaca yang membutuhkan.
3. Dapat menganalisis kasus yang terjadi mengenai terbitnya SP2DK atas perbedaan yang terjadi antara SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PPN yang dilaporkan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoneisa Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.
6. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu bahwa pajak dikenakan atas penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Tambahan kemampuan ekonomis atau

penghasilan tersebut bisa berupa gaji, honorarium, hadiah, keuntungan usaha, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis utama PPh di Indonesia, seperti PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 26, 29, dan PPh Final Pasal 4 ayat 2.

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak merujuk pada orang atau individu yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak adalah pihak yang diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan dan dikenal sebagai Wajib Pajak (WP). Menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak orang pribadi adalah individu yang tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, atau yang dalam tahun pajak tersebut berada di Indonesia dengan niat untuk menetap. Sementara itu, subjek pajak badan adalah entitas yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Badan yang dimaksud antara lain Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama atau bentuk apapun.

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak penghasilan adalah setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang diterima Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan Wajib Pajak tersebut, dalam berbagai nama dan bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk menambah kas negara. Dalam dunia perpajakan, semua orang tidak asing lagi dengan yang namanya PPN. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

2.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek PPN di Indonesia adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Subjek PPN dibagi menjadi dua, antara lain :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Bagi Subjek Pajak yang telah ditetapkan sebagai PKP, PPN akan terutang apabila PKP melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, serta ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP.

2. Non PKP

Untuk Subjek Pajak yang belum menjadi PKP, PPN tetap akan terutang meskipun kegiatan yang dilakukan merupakan objek PPN namun belum dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini termasuk dalam kasus impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean maupun di dalam Daerah Pabean, serta kegiatan membangun sendiri.

2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.42 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
2. Impor BKP,
3. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean,
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean,
6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP,
7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP
8. Ekspor JKP oleh PKP.

2.3.3 Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengeluarkan faktur pajak saat melakukan penjualan barang atau jasa yang terkena pajak sebagai tanda bahwa perusahaan telah memungut pajak dari pembeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Faktur pajak harus dibuat pada :

- a. saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
- b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
- c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- d. saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.

2.3.4 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang - Undang PPN sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 adalah PPN yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas pembelian Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak, atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 25 adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; Dalam pengenaan PPN, PKP mengkreditkan pajak masukan dan keluaran dalam masa pajak yang sama. Jika dalam suatu Masa Pajak jumlah Pajak Keluaran melebihi jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan pajak yang harus dibayar oleh PKP. Sebaliknya, jika jumlah Pajak Masukan melebihi jumlah Pajak Keluaran, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan dengan pajak yang terutang pada periode pajak berikutnya, atau dapat diminta pengembalian.

2.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan PMK Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menyampaikan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, melaporkan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta mencatat harta dan kewajiban sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam perpajakan. SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan penghasilan yang merupakan objek pajak serta perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang sebenarnya terutang.

SPT dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) atau Bagian Tahun Pajak, dan SPT Masa.

2.4.1 SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

SPT Tahunan PPh Badan adalah surat pelaporan pajak penghasilan wajib pajak badan yang harus disampaikan oleh setiap badan usaha atau badan hukum yang memiliki penghasilan atau pendapatan dalam suatu tahun pajak. SPT ini merupakan kewajiban bagi badan usaha untuk melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban pajaknya kepada otoritas pajak setiap tahunnya. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjelaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Undang – Undang HPP Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa batas dalam penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Apabila Wajib Pajak terdapat indikasi terlambat dalam pelaporan SPT akan dikenakan sanksi berupa denda. Wajib Pajak Badan akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000 per SPT tahunan jika terlambat lapor.

2.4.2 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

SPT Masa PPN adalah dokumen yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang atas penjualan barang dan jasa selama periode pajak tertentu. Penyampaian SPT Masa PPN dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, meskipun PKP tidak melakukan transaksi apapun. SPT Masa PPN digunakan untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas jumlah PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya harus dibayar, serta untuk menginformasikan mengenai:

1. Perhitungan PPN Masukan yang dapat dikreditkan terhadap PPN Keluaran
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan oleh PKP sendiri atau melalui perantara lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

2.5 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Surat Edaran Direktur Jenderal Perpajakan Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penerbitan SP2DK bertujuan untuk mengawasi penerapan sistem *self-assessment* dalam proses perpajakan di Indonesia. Penetapan Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 dijadikan pedoman bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melaksanakan permintaan penjelasan Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, permintaan wajib pajak untuk memberikan penjelasan mengenai data dan informasi dapat berjalan secara efektif.

Data dan/atau Keterangan merujuk pada data atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh DJP dari berbagai sumber seperti sistem informasi DJP, SPT Wajib Pajak, alat keterangan, hasil kunjungan atau *visit*, informasi dari Instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis Informasi, Data,

Laporan dan Pengaduan (IDL), internet, dan data dan/atau informasi lainnya. Kepala KPP memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan mengenai informasi dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak yang pelaksanaannya dilakukan oleh:

1. *Account Representative*; dan/atau
2. Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

Proses permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak sesuai dengan SE-05/PJ/2022 dilakukan dengan menggunakan SP2DK dengan cara :

1. Penerbitan dan Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
 - a. Dalam rangka Pengawasan, Kepala KPP berwenang melaksanakan P2DK dengan penerbitan SP2DK melalui Sistem Informasi Pengawasan dan ditandatangani oleh Kepala KPP.
 - b. SP2DK disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara sebagai berikut:
 1. dikirimkan melalui faksimili;
 2. dikirimkan menggunakan jasa pos/kurir/ekspedisi dengan bukti pengiriman surat; dan/atau
 3. diserahkan langsung kepada Wajib Pajak melalui Kunjungan atau pada saat Wajib Pajak datang ke KPP, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerbitan SP2DK.
 - c. SP2DK juga disampaikan secara elektronik melalui akun DJP Online milik Wajib Pajak apabila:
 1. Wajib Pajak telah mengaktifkan akun DJP Online miliknya; dan
 2. DJP Online telah mengakomodasi penyampaian SP2DK elektronik.
 - d. Dalam hal Wajib Pajak tidak bersedia menerima SP2DK yang disampaikan kepadanya, Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan penjelasan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling lama 14 (empat belas) hari setelah:
2. Penerimaan Penjelasan dari Wajib Pajak

- a. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK yang disampaikan kepadanya sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak:
 - 1. Tanggal SP2DK;
 - 2. Tanggal kirim SP2DK menggunakan faksimili/jasa pos/ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - 3. Tanggal penyerahan SP2DK secara langsung kepada Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK sebagaimana dimaksud pada huruf a) secara:
 - 1. Tatap muka langsung;
 - 2. Tatap muka melalui media audio visual; dan/atau
 - 3. Tertulis.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Perusahaan yang menjadi objek analisis dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah salah satu klien dari PT. Pasagung Prima Solution yaitu PT X. PT X merupakan perusahaan yang berlokasi di Sidoarjo. PT X bergerak di bidang pedagang eceran makanan. Kegiatan usaha telah berjalan sejak tahun 2018, telah memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Sidoarjo Selatan dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2018. PT X menerima SP2DK yang telah diterbitkan oleh KPP Sidoarjo Selatan pada bulan Desember 2022 atas dugaan data pembelian yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan tahun 2019 dan SPT Masa PPN tahun 2019.

3.2 Waktu

Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu penentuan dosen pembimbing, penyusunan Tugas Akhir, dan pengumpulan Tugas Akhir. Penentuan dosen pembimbing dilakukan pada tanggal 6 Februari 2024. Pengambilan data studi kasus dilakukan sebelum penyusunan Tugas Akhir yaitu pada bulan Februari hingga Maret 2023. Proses penyusunan Tugas Akhir dimulai pada bulan 5 Maret 2023. Kemudian dilanjutkan bulan April hingga 6 Juni 2023 untuk menyempurnakan penyusunan Tugas Akhir sebelum Tugas Akhir dikumpulkan.

3.3 Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2016), metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Teknik utama dalam mengumpulkan data dilakukan melalui observasi dokumen dan wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan cara berinteraksi langsung antara peneliti dan pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi, pemahaman, dan solusi

atas permasalahan yang ada di PT X. Peneliti melakukan pendekatan studi kasus dengan cara eksplorasi secara mendalam terhadap kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih serta dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung. Atas izin dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Pasagung peneliti mengumpulkan data dan dokumen pendukung berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan, SPT Masa PPN, SP2DK, dan Berita Acara Pelaksanaan SP2DK.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

PT X adalah Wajib Pajak Badan yang telah ditetapkan menjadi PKP sejak tahun 2018 karena telah memenuhi persyaratan administrasi pengukuhan PKP sesuai dengan PER-03/PJ/2022 Pasal 45 ayat (1) yang tertulis “Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP”. PT X juga telah memenuhi syarat sebagai PKP sesuai batasan pengusaha kecil PPN sesuai yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2023 pada Pasal 4 ayat (1) yang tertulis “Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).”

PT X adalah perusahaan yang bergerak di sektor Perdagangan Eceran Makanan yang berlokasi di Sidoarjo dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 47249. PT X melakukan kegiatan usahanya dengan melakukan perdagangan berbagai macam *snack* dan minuman dengan sistem grosir, yang dimana pembeli dapat menjual kembali produknya kepada para pengecer, pedagang, atau pengguna industri lainnya. Dalam memperoleh barang dagangannya PT X memasok dari beberapa *supplier* dengan jumlah yang relatif besar. Melalui kegiatan tersebut, terdapat kemungkinan PT X melakukan kelalaian dengan tidak meminta faktur atau *invoice* yang seharusnya diperoleh dari masing – masing *supplier*. Hal tersebut menyebabkan PT X tidak melakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan Atas kelalaiannya, PT X mendapatkan SP2DK pada 2 Desember 2022 untuk SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan tahun 2019

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penyebab Penerbitan SP2DK

Sebagai Wajib Pajak yang patuh, PT X telah melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan dan melaporkan pajak terutanganya setiap tahun. Namun, pada Desember 2022 PT X menerima SP2DK yang diterbitkan oleh DJP atas dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakannya. Berdasarkan SP2DK yang diterima, ditemukan bahwa adanya beberapa data pembelian yang belum dilaporkan oleh PT X pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan tahun 2019. Kelalaian ini disebabkan oleh PT X yang tidak meminta faktur pajak yang telah dilaporkan oleh masing – masing *supplier*, sehingga PT X tidak dapat mengkreditkan Faktur Pajak Masukan tersebut dan tidak melaporkannya pada SPT Tahunan Badan tahun 2019.

Dalam lampiran SP2DK yang diterbitkan kepada PT X pada bulan Desember 2022 mencantumkan rincian data pembelian tahun 2019 yang belum dilaporkan oleh PT X. Tabel 4.1 merupakan rincian data pembelian yang belum terlapor dan telah penulis olah berdasarkan Masa Pajaknya.

Tabel 4. 1 Data Pembelian yang Belum Dilaporkan Lampiran SP2DK

No.	Masa Pajak	DPP	PPN
1.	2019/01	Rp 10.182.672	Rp 1.018.267
2.	2019/02	Rp 56.486.673	Rp 5.648.667
3.	2019/03	Rp 89.038.034	Rp 8.903.803
4.	2019/04	Rp 147.740.954	Rp 14.774.095
5.	2019/05	Rp 155.950.767	Rp 15.595.076
6.	2019/06	Rp 7.125.223	Rp 712.522
7.	2019/07	Rp 307.790.492	Rp 30.779.049
8.	2019/10	Rp 399.816.643	Rp 39.981.664
Total		Rp 1.174.131.458	Rp 117.413.143

Sumber: Data Internal Perusahaan yang diolah, 2022.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa data pembelian yang belum dilaporkan oleh PT X selama tahun 2019 sebesar Rp 1.174.131.458. PT X melakukan setoran pajak kurang dari yang seharusnya akibat data pembelian yang belum dilaporkan tersebut, baik dalam SPT Tahunan Badan tahun 2019 dan SPT Masa PPN tahun 2019.

Berdasarkan SP2DK yang diterima PT X, maka berdasarkan SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan, dan Kunjungan kepada Wajib Pajak terdapat batasan waktu untuk menanggapi SP2DK baik secara langsung maupun tertulis paling lambat 14 hari kerja setelah surat diterima. Tanggapan secara tertulis dapat diberikan dengan mengirimkan penjelasan tertulis yang mengakui ataupun membantah, disertai bukti yang jelas.

4.2.2 Penyelesaian SP2DK atas Data Pembelian yang Belum Dilaporkan

Setelah menerima SP2DK, PT X segera melakukan *chrosscheck* atas data pembelian pada lampiran SP2DK dengan data pembelian perusahaan di tahun 2019. Ditemukan bahwa terdapat beberapa data pembelian yang belum dilaporkan oleh PT X serta data pembelian lain yang dibatalkan oleh *supplier*. Pembatalan faktur dapat disebabkan oleh pembatalan transaksi maupun terjadinya kesalahan dalam pengisian faktur. Pada gambar 4.1 di bawah ini merupakan salah satu contoh Faktur Pajak yang dibatalkan.

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010-000-21-00000230		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :	[REDACTED]	
Alamat :	[REDACTED]	
NPWP :	[REDACTED]	
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :	[REDACTED] (KORRI, LUD ARIJAN SARU)	
Alamat :	[REDACTED] (Dok. No. K30RT300) RW-080 KALPELABUHAN BAWARIN DAHOTA Kec. PELABUHAN	
JAMBATAN	[REDACTED] KALAMANTAN TIRUR 00003	
NPWP :	[REDACTED] 22 000	
No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka Termin
1	PASANGAN BAWANGS BALU No. 100.000 x 6	545.495,00
Harga Jual / Penggantian		545.495,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		545.495,00
PPH = 12% x Dasar Pengenaan Pajak		65.459,40
Total PPN/PM (Pajak Penghasilan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Checklist dan Lembar Pajak-negeri ini telah dipengantar ke Kantor Pajak dan akan diproses kembali ke Kantor Pajak.

Gambar 4. 1 Faktur Batal

Sumber: Data Internal Perusahaan, 2023.

Adanya Faktur Pajak yang dibatalkan menyebabkan perbedaan antara total data pembelian internal perusahaan dengan data pembelian pada lampiran SP2DK. Langkah selanjutnya, PT. X mengkonfirmasi kepada pihak AR bahwa memang

terdapat data pembelian yang belum dilaporkan dan terdapat beberapa data pembelian yang tidak sesuai pada bulan April dan Juli. PT X menanggapi SP2DK tersebut pada tanggal 12 Desember 2022 tepat 10 hari setelah SP2DK diterima. Atas tanggapan yang telah dikirimkan PT X, AR menyetujui perhitungan data pembelian yang dilampirkan pada tabel 4.2 di bawah ini dan dapat digunakan sebagai dasar melakukan pembetulan. Sehingga pada tahap awal penyelesaian ini PT X harus mengkreditkan Faktur Pajak Masukan tersebut.

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Data Pembelian yang Belum Dilaporkan

No.	Masa Pajak	DPP	PPN
1.	2019/01	Rp 10.182.672	Rp 1.018.267
2.	2019/02	Rp 56.486.673	Rp 5.648.667
3.	2019/03	Rp 89.038.034	Rp 8.903.803
4.	2019/04	Rp 141.789.726	Rp 14.178.972
5.	2019/05	Rp 155.950.767	Rp 15.595.076
6.	2019/06	Rp 7.125.223	Rp 712.522
7.	2019/07	Rp 237.221.421	Rp 23.722.142
8.	2019/10	Rp 399.816.643	Rp 39.981.664
Total		Rp 1.097.611.159	Rp 109.761.115

Sumber: Data Internal Perusahaan yang diolah, 2023.

Pada tahap awal penyelesaian ini PT X harus mengkreditkan Faktur Pajak Masukan terlebih dahulu. Pengkreditan Faktur Pajak Masukan dilakukan melalui aplikasi e-Faktur dengan mencantumkan nomor seri faktur pajak, NPWP supplier, masa pengkreditan, dan nominal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPN yang harus dibayarkan. Faktur pajak yang berasal dari *supplier* sangat dibutuhkan dalam pengkreditan Faktur Pajak Masukan karena memuat informasi terkait rincian data pembelian. Setelah melakukan pengkreditan, langkah selanjutnya adalah *upload* Faktur Pajak Masukan tersebut dan melaporkannya pada web e-Faktur. Faktur Pajak Masukan yang telah dilaporkan ini mempengaruhi perubahan nominal yang ada pada SPT Masa PPN kolom B2.

Tabel 4. 3 Rekapitulasi Faktur Masukan SPT Masa PPN 2019 Normal

No.	Masa Pajak	SPT Normal	
		DPP	PPN
1.	2019/01	Rp 2.290.090.551	Rp 229.009.023
2.	2019/02	Rp 2.287.415.848	Rp 228.741.560
3.	2019/03	Rp 3.719.021.381	Rp 371.902.096
4.	2019/04	Rp 2.404.398.457	Rp 240.439.819
5.	2019/05	Rp 4.775.756.488	Rp 477.575.609
6.	2019/06	Rp 2.928.348.120	Rp 292.834.790
7.	2019/07	Rp 1.972.754.403	Rp 197.275.429
8.	2019/08	Rp 2.646.203.299	Rp 264.620.284
9.	2019/09	Rp 2.346.781.133	Rp 234.678.078
10.	2019/10	Rp 1.938.649.838	Rp 193.864.941
11.	2019/11	Rp 2.638.875.582	Rp 263.887.520
12.	2019/12	Rp 2.651.507.445	Rp 265.150.667
Total		Rp 32.599.802.545	Rp 3.259.980.255

Sumber: Data Internal Perusahaan yang diolah, 2020.

Tabel 4.3 merupakan rekapitulasi Faktur Masukan pada SPT Masa PPN tahun 2019 normal yang sudah dilaporkan oleh PT X sebelumnya. Diketahui bahwa perhitungan tersebut jika dikalkulasikan satu tahun pajak, total DPP pembelian sebesar Rp 32.599.802.545 dan PPN dengan tarif 10% sebesar Rp 3.259.980.255. Perhitungan tersebut juga sudah sesuai dengan total pembelian yang telah dilaporkan pada SPT Tahunan Badan tahun 2019 normal.

Dalam ketentuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 8 ayat 1 Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Maka dari itu PT X melakukan pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Dalam hal daluwarsa penetapan adalah batas waktu yang telah ditetapkan yaitu dengan jangka waktu 5 tahun setelah berakhirnya Masa Pajak.

Batasan waktu yang diberikan oleh DJP sangat berpengaruh pada proses pembetulan SPT, karena semakin lama proses pembetulan dilakukan, semakin besar pula sanksi bunga yang harus ditanggung oleh PT. X. Hal ini akan mengakibatkan

biaya yang signifikan bagi PT. X. Untuk menghindari hal ini, wajib pajak perlu memahami ketentuan pembetulan SPT. Pembetulan SPT Masa PPN pada PT X dilakukan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Oktober Tahun 2019, selain itu juga dilakukan pembetulan SPT Tahunan Badan tahun 2019 atas nilai pembelian.

Selain mengakibatkan kurang bayar akibat adanya Faktur Pajak Masukan yang belum dikreditkan, PT X juga berpotensi menerima sanksi bunga atas kekurangan utang pajak akibat pembetulan yang dilakukan. Sanksi administrasi ini disampaikan DJP melalui Surat Tagihan Pajak (STP). STP adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh DJP yang digunakan untuk menagih pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang – Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Begitu juga dengan pembetulan SPT Masa pada Pasal 8 ayat (2a) UU HPP, wajib pajak yang membetulkan sendiri SPT masa dan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar maka akan dikenakan sanksi bunga.

Tabel 4. 4 Rekapitulasi Perhitungan Faktur Masukan SPT Masa PPN 2019

Masa Pajak	Faktur Masukan SPT Normal		Faktur Masukan Belum Terlapor		Faktur Masukan SPT Pembetulan	
	DPD	PPN	DPD	PPN	DPD	PPN
1	Rp. 2.290.090.551	Rp. 229.009.023	Rp. 10.182.672	Rp. 1.018.267	Rp. 2.300.273.223	Rp. 230.027.289
2	Rp. 2.287.415.848	Rp. 228.741.560	Rp. 56.486.673	Rp. 5.648.667	Rp. 2.343.902.521	Rp. 234.390.227
3	Rp. 3.119.021.381	Rp. 311.902.096	Rp. 89.038.034	Rp. 8.903.803	Rp. 3.808.099.415	Rp. 380.805.896
4	Rp. 2.404.398.457	Rp. 240.439.819	Rp. 141.789.726	Rp. 14.178.972	Rp. 2.546.188.183	Rp. 254.618.789
5	Rp. 4.775.768.888	Rp. 477.576.609	Rp. 155.950.767	Rp. 15.595.076	Rp. 4.931.707.255	Rp. 493.170.679
6	Rp. 2.928.348.126	Rp. 292.834.790	Rp. 7.125.223	Rp. 712.522	Rp. 2.935.473.343	Rp. 293.547.311
7	Rp. 1.972.754.403	Rp. 197.275.429	Rp. 237.221.421	Rp. 23.722.142	Rp. 2.209.975.824	Rp. 220.997.567
8	Rp. 2.646.203.299	Rp. 264.620.284	-	-	Rp. 2.646.203.299	Rp. 264.620.284
9	Rp. 2.346.781.133	Rp. 234.678.078	-	-	Rp. 2.346.781.133	Rp. 234.678.078
10	Rp. 1.936.649.836	Rp. 193.664.941	Rp. 390.816.643	Rp. 39.081.664	Rp. 2.338.466.481	Rp. 233.846.606
11	Rp. 2.638.875.582	Rp. 263.887.520	-	-	Rp. 2.638.875.582	Rp. 263.887.520
12	Rp. 2.651.507.445	Rp. 265.150.667	-	-	Rp. 2.651.507.445	Rp. 265.150.667
Total	Rp. 32.391.802.545	Rp. 3.239.380.233	Rp. 1.097.611.159	Rp. 109.761.115	Rp. 33.697.413.704	Rp. 3.369.740.915

Sumber: Data Internal Perusahaan yang diolah, 2023.

Tabel 4.4 merupakan rekapitulasi pembetulan SPT Masa PPN tahun 2019 setelah dilakukan pembetulan. Diketahui bahwa total perhitungan Pajak Masukan pada SPT Masa PPN tahun 2019 normal adalah sebesar Rp 32.599.802.545. Setelah dilakukan pembetulan Pajak Masukan berubah menjadi Rp 33.697.413.704 dikarenakan terdapat penambahan data pembelian sebagai dasar perhitungan Pajak Masukan dengan DPP sebesar Rp 1.097.611.159.

Selain mengalami perubahan pada total pembelian, PT X juga mengalami perubahan pada penjualan. Perubahan tersebut disebabkan oleh adanya penjualan yang belum dilaporkan oleh PT X pada tahun 2019. Sehingga, berpengaruh pada total Faktur Pajak Keluaran yang akan dilakukan pembetulan. Tabel 4.5 di bawah ini merupakan perhitungan Faktur Pajak Keluaran normal dan pembetulan pada SPT Masa PPN tahun 2019.

Tabel 4. 5 Rekapitulasi Perhitungan Faktur Keluaran SPT Masa PPN 2019

Masa Pajak	Faktur Keluaran SPT Normal		Faktur Keluaran Belum Terlapor		Faktur Keluaran SPT Pembetulan	
	DPP	PPN	DPP	PPN	DPP	PPN
1	Rp 2.370.286.500	Rp 237.028.650	Rp 13.000.000	Rp 1.300.000	Rp 2.383.286.500	Rp 238.328.650
2	Rp 2.413.388.000	Rp 241.338.800	Rp 58.000.000	Rp 5.800.000	Rp 2.471.388.000	Rp 247.138.800
3	Rp 2.889.105.000	Rp 288.910.500	Rp 920.000.000	Rp 92.000.000	Rp 3.809.105.000	Rp 380.910.500
4	Rp 3.306.979.000	Rp 330.697.900			Rp 3.306.979.000	Rp 330.697.900
5	Rp 4.911.160.000	Rp 491.116.000	Rp 157.000.000	Rp 15.700.000	Rp 5.068.160.000	Rp 506.816.000
6	Rp 1.677.460.000	Rp 167.746.000	Rp 152.000.000	Rp 15.200.000	Rp 1.829.460.000	Rp 182.946.000
7	Rp 2.897.075.455	Rp 289.707.545	Rp 424.204.545	Rp 42.420.455	Rp 3.321.280.000	Rp 332.128.000
8	Rp 3.027.946.600	Rp 302.794.660	-	-	Rp 3.027.946.600	Rp 302.794.660
9	Rp 2.497.254.343	Rp 249.725.341	-	-	Rp 2.497.254.343	Rp 249.725.341
10	Rp 2.207.768.000	Rp 220.770.800	Rp 421.373.193	Rp 42.137.319	Rp 2.629.061.193	Rp 262.908.119
11	Rp 2.700.483.805	Rp 270.048.380	-	-	Rp 2.700.483.805	Rp 270.048.380
12	Rp 2.750.971.625	Rp 275.097.162	-	-	Rp 2.750.971.625	Rp 275.097.162
Total	Rp 33.649.810.328	Rp 3.364.981.738	Rp 2.145.577.738	Rp 214.557.774	Rp 35.795.386.066	Rp 3.579.539.512

Sumber: Data Internal Perusahaan yang diolah, 2023.

Diketahui bahwa Faktur Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN 2019 terdapat data penjualan yang belum dilaporkan oleh PT X dengan DPP sebesar Rp 2.145.577.738 dan PPN sebesar Rp 214.557.774. Data penjualan tersebut merupakan temuan setelah dilakukan pelaporan SPT Masa PPN yang mengharuskan penyesuaian pada Faktur Pajak Keluaran. Sehingga PT X juga harus melakukan pembetulan atas Faktur Pajak Keluaran pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, dan Oktober.

Tabel 4. 6 Rekapitulasi Pembetulan SPT Masa PPN 2019

SPT MASA PPN 2019 PEMBETULAN					
Masa Pajak	Faktur Keluaran		Faktur Masukan		Kurang Bayar
	DPP	PPN	DPP	PPN	
1	Rp 2.383.286.500	Rp 238.328.650	Rp 2.300.273.223	Rp 230.027.289	Rp 8.301.361
2	Rp 2.471.388.000	Rp 247.138.800	Rp 2.343.902.521	Rp 234.390.227	Rp 12.748.573
3	Rp 3.809.105.000	Rp 380.910.500	Rp 3.808.059.415	Rp 380.805.896	Rp 104.604
4	Rp 3.306.979.000	Rp 330.697.900	Rp 2.546.188.183	Rp 254.618.789	Rp 76.079.111
5	Rp 5.068.160.000	Rp 506.816.000	Rp 4.931.707.255	Rp 493.170.679	Rp 13.645.321
6	Rp 1.829.460.000	Rp 182.946.000	Rp 2.935.473.343	Rp 293.547.311	Rp 110.601.311
7	Rp 3.321.280.000	Rp 332.128.000	Rp 2.209.975.824	Rp 331.598.878	Rp 529.122
8	Rp 3.027.946.600	Rp 302.794.660	Rp 2.846.203.299	Rp 284.620.284	Rp -
9	Rp 2.497.254.343	Rp 249.725.341	Rp 2.346.781.133	Rp 234.678.078	Rp -
10	Rp 2.629.081.193	Rp 262.908.119	Rp 2.338.468.481	Rp 233.846.608	Rp 29.061.511
11	Rp 2.700.483.805	Rp 270.048.380	Rp 2.638.875.582	Rp 263.887.520	Rp -
12	Rp 2.750.971.625	Rp 275.097.162	Rp 2.651.507.445	Rp 265.150.667	Rp -
Total	Rp 35.795.396.066	Rp 3.579.539.512	Rp 33.697.413.704	Rp 3.480.342.226	Rp 140.469.603

Sumber: Data Internal Perusahaan yang diolah, 2023.

Pada tabel 4.6 di atas diketahui bahwa Faktur Pajak Keluaran PT X adalah sebesar Rp 35.795.396.066 dengan PPN sebesar Rp 3.579.539.512. Perhitungan Faktur Pajak Masukan adalah sebesar Rp 33.697.413.794 dengan PPN Rp 3.480.342.226. Hal ini mengakibatkan perhitungan kurang bayar SPT Masa PPN mengalami perubahan lebih besar setelah melakukan pembetulan yaitu sebesar Rp 140.469.603.

Tabel 4. 7 Perhitungan Kurang Bayar SPT Masa PPN 2019

KB SPT PPN Pembetulan	KB SPT PPN Normal yang Telah Disetor	Kurang Bayar yang Harus Disetor	STP
Rp 8.301.361	Rp 8.019.627	Rp 281.734	Rp 66.939
Rp 12.748.573	Rp 12.597.240	Rp 151.333	Rp 35.956
Rp 104.604	Rp 82.991.596	Rp 104.604	Rp 24.853
Rp 76.079.111	Rp 7.266.485	Rp 68.812.626	Rp 16.349.879
Rp 13.645.321	Rp 13.540.391	Rp 104.930	Rp 24.931
Rp 110.601.311	Rp 125.088.790	Rp -	Rp -
Rp 529.122	Rp 30.236.220	Rp 529.122	Rp 125.719
Rp -	Rp 38.174.376	Rp -	Rp -
Rp -	Rp 15.047.263	Rp -	Rp -
Rp 29.061.511	Rp 26.905.859	Rp 2.155.652	Rp 512.182
Rp -	Rp 6.160.860	Rp -	Rp -
Rp -	Rp 9.946.495	Rp -	Rp -
Rp 140.469.603	Rp 68.329.602	Rp 72.140.001	Rp 17.140.459

Sumber: Data Internal Perusahaan yang diolah, 2023.

Perhitungan kurang bayar setelah dilakukan pembetulan didapatkan total Rp 140.469.603 tetapi atas kurang bayar tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar

Rp 68.329.602 pada SPT Masa PPN tahun 2019 yang telah dilaporkan sebelumnya. Sehingga PT X harus melakukan penyetoran kurang bayar atas PPN sebesar Rp 72.140.002. Atas pembetulan SPT Masa PPN tersebut PT X mendapatkan STP sebesar Rp 17.140.459. PT X dapat melakukan pelunasan STP dengan cara melakukan pembayaran pada bank yang menerima pembayaran pajak.

Dalam hal melakukan pembetulan, PT X tidak hanya melakukan pada SPT Masa PPN, tetapi juga wajib melakukan pembetulan pada SPT Tahunan Badan 2019. Atas data pembelian yang belum dilaporkan, diperhitungkan ke dalam komponen HPP pada Laporan Keuangan. Tabel 4.4 menunjukkan perhitungan Laporan Keuangan pada SPT Tahunan Badan tahun 2019 dalam kondisi normal dan setelah pembetulan.

Tabel 4. 8 Laporan Laba Rugi Normal dan Pembetulan

SPT Tahunan Badan 2019	Normal	Pembetulan
Peredaran Usaha	Rp 33.674.022.873	Rp 35.795.396.066
Harga Pokok Penjualan	-Rp 32.202.577.845	-Rp 34.064.734.413
Biaya Usaha Lainnya	-Rp 1.407.484.850	-Rp 1.627.664.973
Penghasilan Neto dari Usaha	Rp 63.960.178	Rp 102.996.680
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp 58.750.000	Rp 58.750.000
Penyesuaian Fiskal Positif		Rp 375.000
Penghasilan Neto Komersial	Rp 122.710.178	Rp 162.121.680
Penghasilan Kena Pajak	Rp 122.710.178	Rp 162.121.680
PPh Terutang (Ps 31E)	Rp 28.491.066	Rp 37.817.242
Kredit Pajak	-Rp 435.856	-Rp 435.856
PPh dibayar sendiri	Rp 28.055.210	Rp 37.381.386
PPh 25	-Rp 28.000.938	-Rp 28.000.938
Kurang Bayar	Rp 54.272	Rp 9.380.448
Sanksi Bunga		Rp 2.215.899

Sumber: Data Internal Perusahaan yang diolah, 2023.

Pada tabel 4.8 yang telah penulis olah diatas merupakan data yang bersumber dari Lampiran I SPT Tahunan Badan tahun 2019 normal dan pembetulan. Diketahui bahwa pada nominal yang terdapat pada peredaran usaha merupakan perolehan dari total Faktur Pajak Keluaran yang telah dilakukan pembetulan yaitu sebesar Rp 35.795.396.066. Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) normal adalah sebesar Rp 32.202.577.845 sedangkan pada pembetulan sebesar Rp 34.064.734.383. Hal tersebut dikarenakan PT X melakukan pembetulan dengan menambahkan data

pembelian yang belum dilaporkan sebelumnya. Selain itu, pada komponen biaya usaha lainnya mengalami perubahan yang pada awalnya sebesar Rp 1.407.484.850 menjadi Rp 1.627.664.973 dikarenakan adanya penambahan pada biaya sewa dan biaya lainnya. Tentu saja dari pembetulan tersebut juga akan mengubah hasil perhitungan kurang bayar, dimana tertera pada SPT Tahunan Badan sebelum pembetulan berjumlah kurang bayar Rp 54.272 dan setelah melakukan pembetulan menjadi kurang bayar sebesar Rp 9.380.448. Sehingga PT X harus melakukan penyetoran sebesar Rp 9.326.176. PT X juga menanggung denda administrasi atas kekurangan utang pajak akibat pembetulan sebesar Rp 2.215.899.

4.3 Solusi

Solusi yang dapat diberikan untuk PT. X atas pembahasan yang telah dijelaskan adalah melakukan *chrosscheck* atas temuan data pembelian yang belum dilaporkan pada lampiran SP2DK dengan data pembelian internal perusahaan. PT. X wajib mengirimkan surat tanggapan SP2DK kepada KPP mengenai konfirmasi terkait adanya data pembelian yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan tahun 2019 dan SPT Masa PPN tahun 2019. Surat tanggapan SP2DK harus segera dikirim paling lambat 14 hari setelah SP2DK tersebut diterima.

PT. X wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPN karena penambahan transaksi berupa faktur masukan pada SPT Masa PPN. Pembetulan ini dilakukan dengan mengkreditkan Faktur Pajak Masukan pada aplikasi e-Faktur dan melakukan *upload* serta *posting* atas Faktur Pajak Masukan tersebut. Setelah melakukan *posting*,. Atas pembetulan tersebut menimbulkan perhitungan kurang bayar yang harus disetor PT X yaitu sebesar Rp 72.140.002. Berdasarkan kurang bayar tersebut PT X harus melakukan pembayaran pada bulan Januari sebesar. Setelah dilakukan pembayaran PT X wajib membuka web e-faktur untuk melaporkan pembetulan SPT Masa PPN tersebut. Selain itu, PT X juga membayar atas sanksi bunga atas kekurangan utang pajak akibat pembetulan sebesar Rp 17.140.459.

Setelah SPT Masa PPN dilakukan pembetulan maka selanjutnya adalah pembetulan pada SPT Tahunan Badan tahun 2019. Pembetulan SPT Tahunan Badan

tahun 2019 diawali dengan melakukan pembetulan pada Laporan Laba Rugi PT X tahun 2019, langkah selanjutnya yaitu melakukan pembetulan pada SPT Tahunan Badan. Dengan mengunduh *e-Form* pembetulan SPT Tahunan Badan pada website DJP Online perusahaan. Pada Lampiran II yaitu perincian Harga Pokok Penjualan pada kolom pembelian serta lampiran 8A yaitu transkrip kutipan elemen – elemen dari laporan keuangan dilakukan pembetulan sesuai data yang ada. Pembetulan tersebut akan menimbulkan perhitungan kurang bayar yaitu sebesar Rp 9.380.448. Setelah dilakukan pembayaran, maka PT X melakukan pelaporan SPT Tahunan Badan tahun 2019. PT X juga membayar atas sanksi bunga atas kekurangan utang pajak akibat pembetulan sebesar Rp 2.215.899.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. PT X mendapatkan SP2DK pada Tahun 2022 yang diterbitkan oleh KPP karena adanya data pembelian yang belum di laporkan pada SPT Masa PPN tahun 2019 dan SPT Tahunan Badan tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan PT X yang tidak meminta faktur dari masing – masing *supplier* pada Tahun 2019 sehingga tidak dapat melakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan. PT X wajib melakukan pertanggungjawaban dengan melakukan perhitungan ulang mengenai total pembelian pada Masa Pajak Tahun 2019 tersebut.
2. Sebagai bentuk penyelesaian atas SP2DK yang diterima PT X melakukan analisis terhadap data pembelian yang belum dilaporkan dengan bentuk pertanggungjawaban mengirimkan surat tanggapan dan melakukan pembetulan SPT Masa PPN tahun 2019 pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Oktober serta SPT Tahunan Badan tahun 2019. Akibat pembetulan tersebut PT X melakukan setoran atas kurang bayar pada SPT Masa PPN tahun 2019 bulan Januari sebesar 281.734, Februari sebesar 151.333, Maret sebesar 104.604, April sebesar 68.812.626, Mei sebesar 104.930, Juli sebesar 529.122, Oktober sebesar 2.155.652 dan juga kurang bayar pada SPT Tahunan Badan tahun 2019 sebesar 9.380.448. PT X juga menanggung sanksi administrasi berupa sanksi bunga yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar pada SPT Masa PPN sebesar 17.140.459 dan pada SPT Tahunan Badan tahun 2019 sebesar 2.215.899.

5.2 Saran

Saran yang didapat dari studi kasus dan kesimpulan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. PT X diharapkan untuk meminta dan menyimpan faktur yang telah dilaporkan oleh *supplier* agar dapat dilakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan ketika selesai melakukan transaksi pembelian.
2. PT X diharapkan setiap akhir bulan memiliki rekapitulasi terkait transaksi pembelian yang dilakukan dengan beberapa *supplier* agar dapat memeriksa kembali apakah sudah sesuai dengan total pembelian yang sudah terlapor atau belum.
3. PT X harus segera melakukan pembetulan SPT Masa PPN maupun SPT Tahunan Badan jika terdapat Faktur Pajak Masukan yang belum dikreditkan dan mengajukan laporan atas kekurangan pajak maupun sanksi bunga yang harus dibayarkan agar tidak lagi menerima SP2DK dari KPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, 2022. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2022. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Langgeng Noerman Syah, A., 2023. Ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana 10.
- Menteri Keuangan, 2023. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- Pohan, Anwar, C., 2016. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. PT. Gramedia Utama Pustaka, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2021. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Republik Indonesia, 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Sulastri Simbolon, M., Sandra, A., 2022. Evaluasi atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang Diterima PT Y Konstruksi Jakarta Timur Tahun 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO SELATAN
Jl. Raya Jati K Sidoruko 61217
TELEPON (031) 847143431-43432 (031) 841714-17145 pwn.bakulaji
LAYANAN PENERANGAN DAN PENGUNJANGAN PAJAK (031) 155088
EMAIL: kprptasidoarjo.pajak@infoindonesia.go.id

Nomor : SP2DK-9316/WPJ.24/KP.02/2022
Sifat : Sangat segera
Lampiran : Satu set
Hal : Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

2 Desember 2022

Yth. Pimpinan PT. Sumber Pangan Makmur Bersama
Ruko Jati Kepuh Indah No. 05 Blok I RT.012 RW.003
Larangan, Candi
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61271

Kami mengucapkan terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada sistem informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
2. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, Saudara diperkenankan untuk menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah saudara sampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan belum dilakukan pemeriksaan pajak.
3. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan dan/atau menyempatkan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009.
4. Berdasarkan penelitian terhadap data dan/atau keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh tahun pajak 2019, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- [REDACTED]
- Terdapat data pembetulan yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN maupun SPT Tahunan Badan.
- Mohon diberikan penjelasan atas hal-hal yang berkaitan dengan pembetulan tersebut.
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Berdasarkan hal tersebut, kami meminta Saudara memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti pendukung atas Data dan/atau Keterangan yang dimaksud secara langsung/tertulis kepada kami paling lama 14 (empat belas) hari setelah surat ini dikirim.

Kp.KP.24/KP.0205/2022

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

(Sambungan Lampiran SP2DK)

Dalam hal Saudara diwakilkan oleh pihak yang diberi kuasa khusus, maka pemberian kuasa khusus tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan/informasi lebih lanjut atau memberikan klarifikasi disertai bukti pendukung dapat menghubungi.

Nama : [REDACTED]
Telepon : [REDACTED]

Kepedulian dan peran aktif Saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat kami hargai. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,



Disandatangani secara elektronik
Mamuk Eko Soessanto

 Kp: KP.24/KP.0205/2022

Lampiran 2

SPT Masa PPN Januari 2019 Normal

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL AJUK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
NAMA PPN : PT SUMBER PANGAN MAKMUR BERSAMA		NPWP : 838481930		= 517 000	
ALAMAT : RUMAH JATI RESIDEN BLOK F NO 88 RT 12 RW 03_KAB. BOJONEGORO		MASA : 01 4 01 2019		Tgl. Baku : 01 01 12	
TEL. RTN : 88421168		JUR : 00000000000000		Jenis Pajak : 01 01 12	
		Jenis Pajak : 01 01 12		Wajib PPN : ☐	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
A. Tentang PPN 1. Dasar 2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pihak yang PPN 4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5) B. Tidak Tentang PPN C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A.1 + B)					
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Kalkulasi yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada A.2) B. PPN dasar dan/atau dalam Masa Pajak yang sama C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggungjawabkan D. PPN kurang atau (lebih) bayar (A.1 - B.1 - C.1) E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibuktikan F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (B.2 - E.2) G. PPN kurang bayar dibuktikan tanggal 2002/01/01 H. PPN lebih bayar pada : 1.1 ☐ Tidak ☐ Dibatalkan dari SPT tahun Pembetulan 1.2 ☐ Baku B.2 atau ☐ Baku B.7 (Dibatalkan dari SPT Pembetulan) 2.1 ☐ PKP Pasal 8 ayat (1) PPN 2.2 ☐ Saldo PKP Pasal 8 ayat (1) PPN 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3.2 ☐ Dikembalikan (Refund) Khusus Refund untuk PKP : a. ☐ Pasal 17C KUP dibuktikan dengan : ☐ Prosektur Pajak atau ☐ Pengembalian Pendahuluan b. ☐ Pasal 17D KUP dibuktikan dengan : ☐ Prosektur Pajak atau ☐ Pengembalian Pendahuluan c. ☐ Pasal 8 ayat (1) PPN dibuktikan dengan Pengembalian Pendahuluan					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00 B. PPN Terutang : Rp. 0,00 C. Dibayar Tanggal : (diisi-menyisi) NTPN :					
IV. PENGEMBALAN KEBALIK PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dikembalikan : Rp. 0,00 B. Dibayar Tanggal : (diisi-menyisi) NTPN :					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri B. PPNBM dasar dan/atau dalam Masa Pajak yang sama C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (A.1 - B.1) D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibuktikan E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (C.2 - D.2) F. PPNBM kurang bayar dibuktikan tanggal (diisi-menyisi) NTPN :					
VI. KELENGKAPAN SPT					
☒ Formulir 1111 A ☒ Formulir 1111 B ☐ Formulir 1111 C ☐ SSP PPN 1 ☐ Surat Kuasa Khusus ☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☐ Formulir 1111 C1 ☐ SSP PPNBM 1 ☐ 0 lembar					
PERNYATAAN : DEMikian Menyatakan Benar-benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak ada unsur penipuan, maka SPT ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pajak dan/atau Kepala Kantor Pajak yang ditunjuk.					
KAS. BOJONEGORO 28-02-2019 (diisi-menyisi) Tanda tangan : ☐ Paksi ☐ Kasi Nama Jelas : HANSEN Jabatan : DIREKTUR Cap Perseorangan :					

F.1.2.52.94

Lampiran 3

SPT Masa PPN Januari 2019 Pembetulan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
Nama Wajib Pajak: PT SUMBER PANGAN BAKARUM BERSAMA		Nomor: 833-0113-06		— 417 — 000	
Alamat: RUKO JATI KEMAYUTAN BLOK P NO 05 RT 12 RW 03, KAB. BOGOR		Tahun: 01 12 2019		Bulan: 01 12	
Telepon: 0822768 HP: 08225890000		RUK: 1		Wajib PPNBM	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
A. Tentang PPN					
1. Ekspor ☒ Rp. 0,00					
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dibayar sendiri ☐ Rp. 2.383.286.500,00					
3. Penyerahan yang PPN-nya dibayar oleh Pemungut PPN ☐ Rp. 0,00					
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dibayar ☐ Rp. 0,00					
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengisian PPN ☐ Rp. 0,00					
Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5) ☐ Rp. 2.383.286.500,00					
B. Tidak Tentang PPN ☐ Rp. 0,00					
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A.4 + B) ☐ Rp. 2.383.286.500,00					
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Keluaran yang harus dibayar sendiri (Jumlah PPN pada A.2) ☐ Rp. 238.328.650,00					
B. PPN dibayar oleh dalam Masa Pajak yang sama ☐ Rp. 0,00					
C. Pajak Masukan yang dapat dipertahankan ☐ Rp. 238.027.280,00					
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (A - B - C) ☐ Rp. 8.301.361,00					
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan ☐ Rp. 8.016.627,00					
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (D - E) ☐ Rp. 281.734,00					
G. PPN kurang bayar dikawal tanggal 29/05/2019 (dd-mm-yyyy)					
H. PPN lebih bayar pada:					
1. ☐ Sisa S.D. (Dikawatirkan SPT tahun Pembetulan) ☐ Sisa S.D. atau ☐ Sisa S.P. (Dikawatirkan SPT Pembetulan)					
2. ☐ PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN atau ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN					
3. ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN atau ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN					
4. ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN atau ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN					
5. ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN atau ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN					
6. ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN atau ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN					
7. ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN atau ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN					
8. ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN atau ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN					
9. ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN atau ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN					
10. ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN atau ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1b) PPN					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN BEMBANUN SEMANG					
A. Jumlah Dasar Pengisian Pajak ☐ Rp. 0,00					
B. PPN tentang ☐ Rp. 0,00					
C. Dikawatirkan ☐ (dd-mm-yyyy)					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BADI PPN GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dibayar kembali ☐ Rp. 0,00					
B. Dikawatirkan ☐ (dd-mm-yyyy)					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG BEMANG					
A. PPNBM yang harus dibayar sendiri ☐ Rp. 0,00					
B. PPNBM dibayar oleh dalam Masa Pajak yang sama ☐ Rp. 0,00					
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (A - B) ☐ Rp. 0,00					
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan ☐ Rp. 0,00					
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (C - D) ☐ Rp. 0,00					
F. PPNBM kurang bayar dikawal tanggal (dd-mm-yyyy)					
VI. KELOMPOKAN SPT					
☒ Formulir 1111.A ☒ Formulir 1111.B ☒ Formulir 1111.C ☒ SPT PPN-2 ☐ Sisa PPN-2					
☒ Formulir 1111.A ☒ Formulir 1111.B ☒ Formulir 1111.C ☒ SPT PPN-3 ☐ Sisa PPN-3					
☒ Formulir 1111.A ☒ Formulir 1111.B ☒ Formulir 1111.C ☒ SPT PPN-4 ☐ Sisa PPN-4					
☒ Formulir 1111.A ☒ Formulir 1111.B ☒ Formulir 1111.C ☒ SPT PPN-5 ☐ Sisa PPN-5					
☒ Formulir 1111.A ☒ Formulir 1111.B ☒ Formulir 1111.C ☒ SPT PPN-6 ☐ Sisa PPN-6					
☒ Formulir 1111.A ☒ Formulir 1111.B ☒ Formulir 1111.C ☒ SPT PPN-7 ☐ Sisa PPN-7					
☒ Formulir 1111.A ☒ Formulir 1111.B ☒ Formulir 1111.C ☒ SPT PPN-8 ☐ Sisa PPN-8					
☒ Formulir 1111.A ☒ Formulir 1111.B ☒ Formulir 1111.C ☒ SPT PPN-9 ☐ Sisa PPN-9					
☒ Formulir 1111.A ☒ Formulir 1111.B ☒ Formulir 1111.C ☒ SPT PPN-10 ☐ Sisa PPN-10					
PERNYATAAN :					
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKSIANYA, SAYA MENYATAKAN BUKHWA APA YANG TELAH SAYA BERITUKAN DI ATAS BERBESITA LAMARAN LAMIRANYA ADALAH BENAR, LINDAP, JEAS DAN TERAK BERSYAWAC.					
Tanda tangan: ☒ PPN ☐ PPN					
Nama: HANIRAN					
Jabatan: DIREKTUR					
Cap: PPN					
KAS: 8000000 06-04-2019 (dd-mm-yyyy)					

E1 2.58.34

Lampiran 4

SPT Masa PPN Februari 2019 Normal

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																																																	
NAMA POKOK : PT SUMBER PANGAN HAKMUL BERSAMA		Nomor : B39-0019-06		- 017 000																																																	
ALAMAT : RUKO JATI REPLEH BLOK H BLOK NO 08 RT 12 RW 03, KAB. BOJONEGORO		Kode : 02 4 002		-2019																																																	
TELEFON : 8542768		NP : 05200900000		Kode : 001																																																	
				☐ Wajib PPNBM																																																	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">A. Tarif PPN</th> <th>0%</th> <th>11%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Barter</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPNnya telah dipotong sesuai</td> <td>Rp.</td> <td>2.413.388.000,00</td> <td>241.338.800,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPNnya dipotong oleh Pemotong PPN</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipotong</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (1 + 4 + 5 + 1 + 4 + 1 + 4 + 1 + 4)</td> <td>Rp.</td> <td>2.413.388.000,00</td> <td>241.338.800,00</td> </tr> <tr> <td>6. Tidak Terdaftar PPN</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1A + 1B)</td> <td>Rp.</td> <td>2.413.388.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						A. Tarif PPN		0%	11%	1. Barter	Rp.	0,00		2. Penyerahan yang PPNnya telah dipotong sesuai	Rp.	2.413.388.000,00	241.338.800,00	3. Penyerahan yang PPNnya dipotong oleh Pemotong PPN	Rp.	0,00	0,00	4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipotong	Rp.	0,00	0,00	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp.	0,00	0,00	Jumlah (1 + 4 + 5 + 1 + 4 + 1 + 4 + 1 + 4)	Rp.	2.413.388.000,00	241.338.800,00	6. Tidak Terdaftar PPN	Rp.	0,00		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1A + 1B)	Rp.	2.413.388.000,00													
A. Tarif PPN		0%	11%																																																		
1. Barter	Rp.	0,00																																																			
2. Penyerahan yang PPNnya telah dipotong sesuai	Rp.	2.413.388.000,00	241.338.800,00																																																		
3. Penyerahan yang PPNnya dipotong oleh Pemotong PPN	Rp.	0,00	0,00																																																		
4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipotong	Rp.	0,00	0,00																																																		
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp.	0,00	0,00																																																		
Jumlah (1 + 4 + 5 + 1 + 4 + 1 + 4 + 1 + 4)	Rp.	2.413.388.000,00	241.338.800,00																																																		
6. Tidak Terdaftar PPN	Rp.	0,00																																																			
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1A + 1B)	Rp.	2.413.388.000,00																																																			
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																																																					
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. Pajak Keluaran yang harus dipotong sesuai (Jumlah PPN pada 1A.3)</td> <td>Rp.</td> <td>241.338.800,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN dikur dari atau dalam Masa Pajak yang sama</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggung</td> <td>Rp.</td> <td>226.741.560,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (1A.3 - B - C)</td> <td>Rp.</td> <td>12.597.240,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena perbedaan (B.D - B.D)</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>G. PPN kurang bayar dikurasi tanggal 25/03/19 0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H. PPN lebih bayar pada :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1 ☐ Dikur dari SPT bulan Pembetulan</td> <td>1.2 ☐ Dikur dari SPT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dikur dari :</td> <td>2.1 ☐ PPN Pasal 2 ayat (4b) PPN</td> <td>2.2 ☐ Selain PPN Pasal 2 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>Sebelum dikur :</td> <td>2.1 ☐ Dikur dari dalam Masa Pajak lebih awal</td> <td>2.2 ☐ Dikur dari dalam Masa Pajak</td> </tr> <tr> <td>2.2 ☐ Dikur dari (Pasal 2)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Khusus Restitusi untuk RPP :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Pasal 11C KUP (dikur dari dengan)</td> <td>☐ Prosedur Biasa</td> <td>☐ Pengembalian Pembetulan</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 11D KUP (dikur dari dengan)</td> <td>☐ Prosedur Biasa</td> <td>☐ Pengembalian Pembetulan</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 8 ayat (4) PPN (dikur dari dengan Pengembalian Pembetulan)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						A. Pajak Keluaran yang harus dipotong sesuai (Jumlah PPN pada 1A.3)	Rp.	241.338.800,00	B. PPN dikur dari atau dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0,00	C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggung	Rp.	226.741.560,00	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (1A.3 - B - C)	Rp.	12.597.240,00	E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp.	0,00	F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena perbedaan (B.D - B.D)	Rp.	0,00	G. PPN kurang bayar dikurasi tanggal 25/03/19 0,00			H. PPN lebih bayar pada :			1.1 ☐ Dikur dari SPT bulan Pembetulan	1.2 ☐ Dikur dari SPT		Dikur dari :	2.1 ☐ PPN Pasal 2 ayat (4b) PPN	2.2 ☐ Selain PPN Pasal 2 ayat (4b) PPN	Sebelum dikur :	2.1 ☐ Dikur dari dalam Masa Pajak lebih awal	2.2 ☐ Dikur dari dalam Masa Pajak	2.2 ☐ Dikur dari (Pasal 2)			Khusus Restitusi untuk RPP :			☐ Pasal 11C KUP (dikur dari dengan)	☐ Prosedur Biasa	☐ Pengembalian Pembetulan	atau ☐ Pasal 11D KUP (dikur dari dengan)	☐ Prosedur Biasa	☐ Pengembalian Pembetulan	atau ☐ Pasal 8 ayat (4) PPN (dikur dari dengan Pengembalian Pembetulan)		
A. Pajak Keluaran yang harus dipotong sesuai (Jumlah PPN pada 1A.3)	Rp.	241.338.800,00																																																			
B. PPN dikur dari atau dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0,00																																																			
C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggung	Rp.	226.741.560,00																																																			
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (1A.3 - B - C)	Rp.	12.597.240,00																																																			
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp.	0,00																																																			
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena perbedaan (B.D - B.D)	Rp.	0,00																																																			
G. PPN kurang bayar dikurasi tanggal 25/03/19 0,00																																																					
H. PPN lebih bayar pada :																																																					
1.1 ☐ Dikur dari SPT bulan Pembetulan	1.2 ☐ Dikur dari SPT																																																				
Dikur dari :	2.1 ☐ PPN Pasal 2 ayat (4b) PPN	2.2 ☐ Selain PPN Pasal 2 ayat (4b) PPN																																																			
Sebelum dikur :	2.1 ☐ Dikur dari dalam Masa Pajak lebih awal	2.2 ☐ Dikur dari dalam Masa Pajak																																																			
2.2 ☐ Dikur dari (Pasal 2)																																																					
Khusus Restitusi untuk RPP :																																																					
☐ Pasal 11C KUP (dikur dari dengan)	☐ Prosedur Biasa	☐ Pengembalian Pembetulan																																																			
atau ☐ Pasal 11D KUP (dikur dari dengan)	☐ Prosedur Biasa	☐ Pengembalian Pembetulan																																																			
atau ☐ Pasal 8 ayat (4) PPN (dikur dari dengan Pengembalian Pembetulan)																																																					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																																					
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang :</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Dikur dari Tanggal :</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp.	0,00	B. PPN Terutang :	Rp.	0,00	C. Dikur dari Tanggal :																																									
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp.	0,00																																																			
B. PPN Terutang :	Rp.	0,00																																																			
C. Dikur dari Tanggal :																																																					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PNP GAGAL BERPRODUKSI																																																					
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. PPN yang wajib dikur kembali :</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Dikur dari Tanggal :</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						A. PPN yang wajib dikur kembali :	Rp.	0,00	B. Dikur dari Tanggal :																																												
A. PPN yang wajib dikur kembali :	Rp.	0,00																																																			
B. Dikur dari Tanggal :																																																					
V. PAJAK PEMJUALAN ATAS BARANG BEKAS																																																					
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. PPhBM yang harus dipotong sendiri</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPhBM dikur dari atau dalam Masa Pajak yang sama</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (1A - VB)</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena perbedaan (1A - VB)</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPhBM kurang bayar dikurasi tanggal :</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						A. PPhBM yang harus dipotong sendiri	Rp.	0,00	B. PPhBM dikur dari atau dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0,00	C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (1A - VB)	Rp.	0,00	D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp.	0,00	E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena perbedaan (1A - VB)	Rp.	0,00	F. PPhBM kurang bayar dikurasi tanggal :																																
A. PPhBM yang harus dipotong sendiri	Rp.	0,00																																																			
B. PPhBM dikur dari atau dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0,00																																																			
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (1A - VB)	Rp.	0,00																																																			
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp.	0,00																																																			
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena perbedaan (1A - VB)	Rp.	0,00																																																			
F. PPhBM kurang bayar dikurasi tanggal :																																																					
VI. KELENGKAPAN SPT																																																					
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>☒ Formulir 1111.AB</td> <td>☒ Formulir 1111.A2</td> <td>☒ Formulir 1111.B2</td> <td>☒ SPT PPN 1</td> <td>☐ Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td>☒ Formulir 1111.A1</td> <td>☒ Formulir 1111.B1</td> <td>☒ Formulir 1111.B3</td> <td>☐ SPT PPhBM</td> <td>☐ ☐ ☐</td> </tr> </tbody> </table>						☒ Formulir 1111.AB	☒ Formulir 1111.A2	☒ Formulir 1111.B2	☒ SPT PPN 1	☐ Surat Kuasa Khusus	☒ Formulir 1111.A1	☒ Formulir 1111.B1	☒ Formulir 1111.B3	☐ SPT PPhBM	☐ ☐ ☐																																						
☒ Formulir 1111.AB	☒ Formulir 1111.A2	☒ Formulir 1111.B2	☒ SPT PPN 1	☐ Surat Kuasa Khusus																																																	
☒ Formulir 1111.A1	☒ Formulir 1111.B1	☒ Formulir 1111.B3	☐ SPT PPhBM	☐ ☐ ☐																																																	
PERNYATAAN : DIBAWA BERKAS/DAFTAR SEPELUKNYA AKAN SEJALAKANNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK SEMPUNYAI.																																																					
TANDA TANGAN : ☒ PNP Nama Jelas : HANSEN ☐ PPhBM Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan :																																																					

F1 2.52.94

Lampiran 5

SPT Masa PPN Februari 2019 Pembetulan

AKSESORIS AKSESORIS AKSESORIS AKSESORIS AKSESORIS AKSESORIS AKSESORIS AKSESORIS AKSESORIS AKSESORIS
AKSESORIS AKSESORIS AKSESORIS AKSESORIS AKSESORIS AKSESORIS AKSESORIS AKSESORIS AKSESORIS AKSESORIS

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Revisi Nomor 01/2015 (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK/2015) dan Nomor 1/PMK/2016

FORMULIR 1111

Surat Pemberitahuan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

NAMA PKP : PT SUMBER PANGAN MAHABIR BERSAMA

ALAMAT : RUMAH JATI KEPURUH BUKIT BLOK F NO 05 RT 12 RW 03, KAB. SUMEDANG

TELEPON : 0842-1581 HP : 082-29880089 FAKS :

NPWP : 503401936 **NPWP :** 503401936 **NPWP :** 503401936

NO. SPT : 02 **NO. SPT :** 02 **NO. SPT :** 02

PERIODE : 1 **PERIODE :** 1 **PERIODE :** 1

Wajib PPNBM

I. PENERAFAAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN :

1. Dasar	Rp. 0,00	Rp. 0,00
2. Penyesuaian yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp. 2.471.388.000,00	Rp. 247.138.800,00
3. Penyesuaian yang PPN nya dipungut oleh Pihak yang PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyesuaian yang PPN nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyesuaian yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5)	Rp. 2.471.388.000,00	Rp. 247.138.800,00

B. Total Terutang PPN

Rp. 0,00

C. Jumlah Seluruh Penyesuaian (A.4 + A.5)

Rp. 2.471.388.000,00

PPN

PPN

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Masukan yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada A.2)

Rp. 247.138.800,00

B. PPN dibayar dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp. 0,00

C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggungjawabkan

Rp. 234.390.227,00

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (A - B - C)

Rp. 12.748.573,00

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan

Rp. 12.597.740,00

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembebasan (D - E)

Rp. 151.333,00

G. PPN kurang bayar dibayar tanggal 2005/2008

(dalam rupiah) **NTPN :** SAMAGAH/EB/ES/ES

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 ☐ Rule 8.0 (Tidak ada) 1.2 ☐ Rule 8.2 atau ☐ Rule 8.4 (Tidak ada) 1.3 ☐ Rule 8.4 (Tidak ada)

atau 2.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN atau 2.2 ☐ Sisa PPN Pasal 9 ayat (1) PPN

atau 3.1 ☐ Ditangguhkan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Ditangguhkan ke Masa Pajak berikutnya (dalam rupiah)

3.2 ☐ Ditangguhkan (Pembayaran)

Khusus Revisi atau PPN :

☐ Pasal 17C KUP dibebaskan dengan ☐ Prosedur Baku atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 17D KUP dibebaskan dengan ☐ Prosedur Baku atau ☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 9 ayat (1) PPN dibebaskan dengan ☐ Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MENDANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00

B. PPN Terutang : Rp. 0,00

C. Dibayar Tanggal : (dalam rupiah) **NTPN :**

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00

B. Dibayar Tanggal : (dalam rupiah) **NTPN :**

V. PAJAK PERJUALAN ATAS BARANG MUAHA

A. PPhBM yang harus dipungut sendiri

Rp. 0,00

B. PPhBM dibayar dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp. 0,00

C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (A - B)

Rp. 0,00

D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan

Rp. 0,00

E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembebasan (C - D)

Rp. 0,00

F. PPhBM kurang bayar dibayar tanggal (dalam rupiah) **NTPN :**

VI. KELENGKAPAN SPT

☐ Formulir 1111 A ☐ Formulir 1111 B ☐ Formulir 1111 C ☐ Formulir 1111 D ☐ Formulir 1111 E ☐ Formulir 1111 F ☐ Formulir 1111 G ☐ Formulir 1111 H ☐ Formulir 1111 I ☐ Formulir 1111 J ☐ Formulir 1111 K ☐ Formulir 1111 L ☐ Formulir 1111 M ☐ Formulir 1111 N ☐ Formulir 1111 O ☐ Formulir 1111 P ☐ Formulir 1111 Q ☐ Formulir 1111 R ☐ Formulir 1111 S ☐ Formulir 1111 T ☐ Formulir 1111 U ☐ Formulir 1111 V ☐ Formulir 1111 W ☐ Formulir 1111 X ☐ Formulir 1111 Y ☐ Formulir 1111 Z ☐ Formulir 1111 AA ☐ Formulir 1111 AB ☐ Formulir 1111 AC ☐ Formulir 1111 AD ☐ Formulir 1111 AE ☐ Formulir 1111 AF ☐ Formulir 1111 AG ☐ Formulir 1111 AH ☐ Formulir 1111 AI ☐ Formulir 1111 AJ ☐ Formulir 1111 AK ☐ Formulir 1111 AL ☐ Formulir 1111 AM ☐ Formulir 1111 AN ☐ Formulir 1111 AO ☐ Formulir 1111 AP ☐ Formulir 1111 AQ ☐ Formulir 1111 AR ☐ Formulir 1111 AS ☐ Formulir 1111 AT ☐ Formulir 1111 AU ☐ Formulir 1111 AV ☐ Formulir 1111 AW ☐ Formulir 1111 AX ☐ Formulir 1111 AY ☐ Formulir 1111 AZ ☐ Formulir 1111 BA ☐ Formulir 1111 BB ☐ Formulir 1111 BC ☐ Formulir 1111 BD ☐ Formulir 1111 BE ☐ Formulir 1111 BF ☐ Formulir 1111 BG ☐ Formulir 1111 BH ☐ Formulir 1111 BI ☐ Formulir 1111 BJ ☐ Formulir 1111 BK ☐ Formulir 1111 BL ☐ Formulir 1111 BM ☐ Formulir 1111 BN ☐ Formulir 1111 BO ☐ Formulir 1111 BP ☐ Formulir 1111 BQ ☐ Formulir 1111 BR ☐ Formulir 1111 BS ☐ Formulir 1111 BT ☐ Formulir 1111 BU ☐ Formulir 1111 BV ☐ Formulir 1111 BW ☐ Formulir 1111 BX ☐ Formulir 1111 BY ☐ Formulir 1111 BZ ☐ Formulir 1111 CA ☐ Formulir 1111 CB ☐ Formulir 1111 CC ☐ Formulir 1111 CD ☐ Formulir 1111 CE ☐ Formulir 1111 CF ☐ Formulir 1111 CG ☐ Formulir 1111 CH ☐ Formulir

Lampiran 6

SPT Masa PPN Maret 2019 Normal

[illegible]

Lampiran 7

SPT Masa PPN Maret 2019 Pembetulan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
NAMA PPN : PT SUMBER PANGAN MAKMUR BERSAMA ALAMAT : PERUM JATI RESEPIN BLOK F NO 88 RT 12 RW 03 KAL TELEFON : 082288888888		Nomor : 8284E1936 Masa : 03 - 4 03 - 2019 Periode : 1 (satu)		Jumlah SPT Nomor : 31 Bulan : 12	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA A. Terutang PPN 1. Dasar 2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemangku PPN 4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5) B. Tidak Terutang PPN C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A + B)		PPN Rp. 0,00 Rp. 3.806.106.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 3.806.106.000,00 Rp. 0,00 Rp. 3.806.106.000,00		PPN Rp. 0,00 Rp. 380.610.600,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 380.610.600,00 Rp. 0,00 Rp. 380.610.600,00	
II. PENGHUTUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR A. Pajak Kurang yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada A.3) B. PPN dasar dikur dari Masa Pajak yang sama C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggungjawabkan D. PPN kurang atau lebih (A - B - C) E. PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang ditetapkan F. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan (D - E) G. PPN kurang bayar diumumkan tanggal 29/03/2019 H. PPN lebih bayar pada : 1.1 ☐ Sub 0.0 (Dikur dari SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Sub 0.0 atau ☐ Sub 0.1 (Dikur dari SPT Pembetulan) Dikur : 2.1 ☐ PKP Pasal 8 ayat (b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 8 ayat (b) PPN dalam bentuk : 2.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak yang sama 2.2 ☐ Dibebaskan (Rabat)		NTPN : A43200AHEBHTSH		NTPN :	
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00 B. PPN Terutang : Rp. 0,00 C. Diurus Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00 B. Diurus Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. PPhBM yang harus dipungut sendiri B. PPhBM dikur dari dasar dari Masa Pajak yang sama C. PPhBM kurang atau lebih (A - B) D. PPhBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang ditetapkan E. PPhBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan (C - D) F. PPhBM kurang bayar diumumkan tanggal		NTPN :		NTPN :	
VI. KELENGKAPAN SPT ☒ Formulir 1111A ☒ Formulir 1111B ☒ Formulir 1111C ☒ SSP PPN 1 lembar ☐ Surat Kuasa Khusus ☒ Formulir 1111A ☒ Formulir 1111B ☒ Formulir 1111C ☐ SSP PPhBM 0 lembar ☐ 0 lembar					
PERNYATAAN : DEMikian Menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERIKAN DI ATAS BERDASAR LAPORAN-LAPORAN YANG ADALAH BENAR, LINGKUP JELAS DAN TIDAK BERSYRAK.		Tanda tangan : ☒ Paksi ☐ Rasis		Nama, Jelas : HANSEN Jabatan : DIREKTUR Cap Perseorangan	

F.1.2.32.04

Lampiran 8

SPT Masa PPN April 2019 Normal

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
DAFTAR KELOMPOK PERUSAHAAN (DKP) Nama: PT SUMBER PANGKUT MAMOR BERRAWA Nomor: 839401936 Tanggal: 01/04/2019 Periode: 01/04/2019 - 30/04/2019		DAFTAR KELOMPOK PERUSAHAAN (DKP) Nama: PT SUMBER PANGKUT MAMOR BERRAWA Nomor: 839401936 Tanggal: 01/04/2019 Periode: 01/04/2019 - 30/04/2019		DAFTAR KELOMPOK PERUSAHAAN (DKP) Nama: PT SUMBER PANGKUT MAMOR BERRAWA Nomor: 839401936 Tanggal: 01/04/2019 Periode: 01/04/2019 - 30/04/2019	
I. PENERYAHAN BARANG DAN JASA A. Terutang PPN: 1. Dasar 2. PPN yang harus dipungut sendiri 3. PPN yang harus dipungut oleh Penjual PPN 4. PPN yang PPNnya tidak dipungut 5. PPN yang dibebaskan dari pengisian PPN Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5) B. Tidak Terutang PPN C. Jumlah Saldo PPN (A + B)		II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR A. Pajak Kewajiban yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada A.2) B. PPN dasar dikur dengan Masa Pajak yang sama C. Pajak Kewajiban yang dapat dipotong D. PPN kurang atau lebih bayar (A - B - C) E. PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan F. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan (D - E) G. PPN kurang bayar dikur dengan 2005/100000 H. PPN lebih bayar pada: 1.1 ☐ Bulat 5.0 (Dikur dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Bulat 5.2 atau 1.3 ☐ Bulat 5.7 (Dikur dalam hal SPT Pembetulan) 2.1 ☐ PPN Positif 5.00 (5% PPN) atau 2.2 ☐ Saldo PPN Positif 5.00 (5% PPN) 3.1 ☐ Dikur pembetulan ke Masa Pajak berikutnya atau 3.2 ☐ Dikur pembetulan (Reduksi) Khusus Reduksi untuk PPN: ☐ Pasal 17C KUP (dikur dengan) ☐ Prosedur Batas atau ☐ Pengembalian Pembetulan atau ☐ Pasal 17D KUP (dikur dengan) ☐ Prosedur Batas atau ☐ Pengembalian Pembetulan atau ☐ Pasal 17E ayat (2) PPN dikur dengan Pengembalian Pembetulan		III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIR A. Jumlah Dasar Pengisian Pajak: Rp. 0,00 B. PPN Terutang: Rp. 0,00 C. Dikur Tanggal: (diisi-menyis) NTPN:	
IV. PERMAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAKI PKP GADAL BERPRODUKSI A. PPN yang telah dibayar kembali: Rp. 0,00 B. Dikur Tanggal: (diisi-menyis) NTPN:		V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. PPhBM yang harus dipungut sendiri B. PPhBM dasar dikur dengan Masa Pajak yang sama C. PPhBM kurang atau lebih bayar (A - B) D. PPhBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan E. PPhBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan (C - D) F. PPhBM kurang bayar dikur dengan tanggal (diisi-menyis) NTPN:		VI. KELENGKAPAN SPT ☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B2 ☒ SSP PPhBM 1 lembar ☐ Saldo Masa Kewajiban ☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B2 ☒ SSP PPhBM 2 lembar ☐ Saldo Masa Kewajiban	
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYKAT.		Tanda tangan: ☒ PPhBM ☐ Gada Nama: HANSEN Jabatan: DIREKTUR Cap: Perusahaan:		Tanggal: 23-05-2019 Periode: 01/04/2019 - 30/04/2019	

F.1.2.32.04

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran 9

SPT Masa PPN April 2019 Pembetulan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
NAMA PPN : PT SUMBER PAWANG MAKMUR BERSAMA Alamat : RUKO JATI KEPUH INDAH BLOK F NO.03 RT 12 RW 03, KASIH TELEPON : 0842168 NIP : 0802588900000		Nomor : 839-001008 Masa : 04 s.d 04 -2019 Periode Pajak : 1 (satu)		017 000 01 s.d 12 ☐ Wajib PPhBM	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
A. Tentang PPN:					
1. Dasar		Rp 0,00		Rp 0,00	
2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri		Rp 3.306.079.000,00		Rp 330.607.900,00	
3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh (Penyedia PPN)		Rp 0,00		Rp 0,00	
4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut		Rp 0,00		Rp 0,00	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		Rp 0,00		Rp 0,00	
Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5)		Rp 3.306.079.000,00		Rp 330.607.900,00	
B. Tidak Tentang PPN		Rp 0,00		Rp 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A + B)		Rp 3.306.079.000,00		Rp 330.607.900,00	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Kikasan yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2)		Rp 330.607.900,00		Rp 0,00	
B. PPN dikur dari dalam Masa Pajak yang sama		Rp 0,00		Rp 254.618.788,00	
C. Pajak Akutasi yang dapat dipotong		Rp 0,00		Rp 78.079.111,00	
D. PPN kurang atau lebih bayar (LA - LB - LC)		Rp 0,00		Rp 7.286.485,00	
E. PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan		Rp 0,00		Rp 68.812.626,00	
F. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan (LD - LE)		Rp 0,00		Rp 0,00	
G. PPN kurang bayar dikurasi tanggal 28/05/2019 0.00		Rp 0,00		Rp 0,00	
H. PPN lebih bayar:		Rp 0,00		Rp 0,00	
1.1 ☐ Sub E.D (Dib dalam SPT bukan Pembetulan)		1.2 ☐ Sub E.D atau		☐ Sub E.F (Dib dalam hal SPT Pembetulan)	
2.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		2.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
3.1 ☐ Dikurasi ke Masa Pajak berikutnya		3.2 ☐ Dikurasi ke Masa Pajak		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
4.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		4.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
5.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		5.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
6.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		6.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
7.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		7.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
8.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		8.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
9.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		9.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
10.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		10.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
11.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		11.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
12.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		12.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
13.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		13.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
14.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		14.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
15.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		15.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
16.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		16.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
17.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		17.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
18.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		18.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
19.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		19.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
20.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		20.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
21.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		21.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
22.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		22.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
23.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		23.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
24.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		24.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
25.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		25.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
26.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		26.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
27.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		27.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
28.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		28.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
29.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		29.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
30.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		30.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
31.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		31.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
32.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		32.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
33.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		33.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
34.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		34.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
35.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		35.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
36.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		36.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
37.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		37.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
38.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		38.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
39.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		39.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
40.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		40.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
41.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		41.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
42.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		42.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
43.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		43.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
44.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		44.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
45.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		45.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
46.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		46.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
47.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		47.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
48.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		48.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
49.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		49.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
50.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		50.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
51.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		51.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
52.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		52.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
53.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		53.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
54.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		54.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
55.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		55.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
56.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		56.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
57.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		57.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
58.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		58.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
59.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		59.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
60.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		60.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
61.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		61.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
62.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		62.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
63.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		63.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
64.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		64.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
65.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		65.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
66.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		66.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
67.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		67.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
68.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		68.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
69.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		69.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
70.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		70.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
71.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		71.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
72.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		72.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
73.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		73.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
74.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		74.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
75.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		75.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
76.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		76.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
77.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		77.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
78.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		78.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
79.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		79.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
80.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		80.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
81.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		81.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
82.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		82.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
83.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		83.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
84.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		84.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
85.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		85.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
86.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		86.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
87.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		87.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
88.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		88.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
89.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		89.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
90.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		90.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
91.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		91.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
92.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		92.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
93.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		93.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
94.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		94.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
95.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		95.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
96.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		96.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
97.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		97.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
98.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		98.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
99.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		99.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
100.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		100.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
101.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		101.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
102.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		102.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
103.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		103.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
104.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		104.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		☐ Dikurasi ke Masa Pajak	
105.1 ☐ PPh Pasal 2 ayat (4) PPh		105.2 ☐ Selain PPh Pasal 2 ayat (4) PPh			

Lampiran 10

SPT Masa PPN Mei 2019 Normal

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
Nama PPN : PT SUMBER RANGKAI MAKMUR BERSAMA		Jenis : 004B/0030		~ 017 000	
Alamat : RUMAH JATIKEPUH BLOK F NO 06 RT 12 RW 03, KAH		Masa : 05 01 2019		Periode : 01 01 12	
NIB : 0042900		NPWP : 0002900000000		Perusahaan No : 01	
				Wajib PPNBM	
I. PENERAHAN BARANG DAN JASA					
A. Terutang PPN					
1. Ekspor ☐ Rp. 0,00					
2. Pengiriman yang PPN nya harus dipungut sendiri ☐ Rp. 4.911.100.000,00					
3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pengusaha PPN ☐ Rp. 0,00					
4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut ☐ Rp. 0,00					
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN ☐ Rp. 0,00					
Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5) ☐ Rp. 4.911.100.000,00					
B. Total Terutang PPN ☐ Rp. 0,00					
C. Jumlah Saluran Pengantaraan (A + B) ☐ Rp. 4.911.100.000,00					
II. PERHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Keluar yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada I.A.2) ☐ Rp. 4.911.100.000,00					
B. PPN dikur dari dalam Masa Pajak yang sama ☐ Rp. 0,00					
C. Pajak Keluar yang dapat dipotong ☐ Rp. 4.775.570.800,00					
D. PPN kurang atau lebih) bayar (A - B - C) ☐ Rp. 135.429.200,00					
E. PPN kurang atau lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan ☐ Rp. 0,00					
F. PPN kurang atau lebih) bayar karena pembetulan (D - E) ☐ Rp. 0,00					
G. PPN kurang bayar dikur sampai 270x19/03/20 (dalam rupiah) ☐ Rp. 0,00					
H. PPN lebih bayar pada :					
1.1 ☐ Sub R.P. (Dikur dari SPT Pajak Pertambahan Nilai)					
1.2 ☐ Sub R.P. atau ☐ Sub R.P. (Dikur dari SPT Pajak Pertambahan Nilai)					
2.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
2.2 ☐ Selain PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
3.1 ☐ Dikur dari Masa Pajak berikutnya					
3.2 ☐ Dikur dari Masa Pajak berikutnya					
4.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
4.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
5.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
5.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
6.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
6.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
7.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
7.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
8.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
8.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
9.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
9.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
10.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
10.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
11.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
11.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
12.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
12.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
13.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
13.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
14.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
14.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
15.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
15.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
16.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
16.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
17.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
17.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
18.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
18.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
19.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
19.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
20.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
20.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
21.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
21.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
22.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
22.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
23.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
23.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
24.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
24.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
25.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
25.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
26.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
26.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
27.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
27.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
28.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
28.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
29.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
29.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
30.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
30.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
31.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
31.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
32.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
32.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
33.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
33.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
34.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
34.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
35.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
35.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
36.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
36.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
37.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
37.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
38.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
38.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
39.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
39.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
40.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
40.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
41.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
41.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
42.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
42.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
43.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
43.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
44.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
44.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
45.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
45.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
46.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
46.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
47.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
47.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
48.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
48.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
49.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
49.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
50.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
50.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
51.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
51.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
52.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
52.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
53.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
53.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
54.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
54.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
55.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
55.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
56.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
56.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
57.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
57.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
58.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
58.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
59.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
59.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
60.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
60.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
61.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
61.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
62.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
62.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
63.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
63.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
64.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
64.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
65.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
65.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
66.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
66.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
67.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
67.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
68.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
68.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
69.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
69.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
70.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
70.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
71.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
71.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
72.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
72.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
73.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
73.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
74.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
74.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
75.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
75.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
76.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
76.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
77.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
77.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
78.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
78.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
79.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
79.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
80.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
80.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
81.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
81.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
82.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
82.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
83.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
83.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
84.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
84.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
85.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
85.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
86.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
86.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
87.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
87.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
88.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
88.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
89.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
89.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
90.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
90.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
91.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
91.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
92.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
92.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
93.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
93.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
94.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
94.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
95.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
95.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
96.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
96.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
97.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
97.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
98.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
98.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
99.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
99.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
100.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
100.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
101.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
101.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
102.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
102.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
103.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
103.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
104.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
104.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
105.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
105.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
106.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
106.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
107.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
107.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
108.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
108.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
109.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
109.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
110.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
110.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
111.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
111.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
112.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
112.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
113.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
113.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
114.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
114.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
115.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
115.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
116.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
116.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
117.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
117.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
118.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
118.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
119.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
119.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
120.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
120.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
121.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
121.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
122.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
122.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
123.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
123.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
124.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
124.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
125.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
125.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
126.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
126.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
127.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
127.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
128.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
128.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
129.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
129.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					

Lampiran 11

SPT Masa PPN Mei 2019 Pembetulan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
NAMA PPN : PT SUMBER PANGAN MAMUR BERSAMA		Surat : 030401936		617 000	
ALAMAT : JL. R. SOEJATI KEMUNING BUKIT BLOK F NO 08 RT 12 RW 03, KAB. BANGKALAYA		KOTA : 65 44 05 - 2019		Tgl. 01 Mei 19	
TELEPON : 08229800000		KDD : 08229800000		Periode ke-1 (SPT) ☐ Wajar PPNBM	
I. PENERAHAAN BARANG DAN JASA A. Tentang PPN: 1. Dasar 2. Penyesuaian yang PPN nya harus dipungut sendiri 3. Penyesuaian yang PPN nya dipungut oleh Penerima PPN 4. Penyesuaian yang PPN nya tidak dipungut 5. Penyesuaian yang dibebaskan dari pengisian PPN Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5) B. Total Tentang PPN C. Jumlah Saldo Penyesuaian (A.1 + B.3)					
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAKURLEBIH BAKUR A. Pajak Kewajiban yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) B. PPN dikur dari total dasar Masa Pajak yang sama C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggungjawabkan D. PPN kurang atau lebih bayar (II.A - II.B - II.C) E. PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan F. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan (II.D - II.E) G. PPN kurang bayar dikur dari tanggal 20190501 0 00 H. PPN lebih bayar pada: 1.1 ☐ Rule 1.0 (Dikur dari SPT Induk Pembetulan) 1.2 ☐ Rule 1.2 atau ☐ Rule 1.2 (Dikur dari SPT Pembetulan) 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (6) PPN ☐ 2.2 ☐ Sisa PKP Pasal 9 ayat (6) PPN 3.1 ☐ Dikur dari SPT Pembetulan ☐ 3.2 ☐ Dikur dari SPT Pembetulan Khusus Restitusi untuk PKP: ☐ Pasal 17C KUP dibebaskan dengan ☐ Prosedur Restitusi atau ☐ Pengembalian Pembetulan ☐ Pasal 17D KUP dibebaskan dengan ☐ Prosedur Restitusi atau ☐ Pengembalian Pembetulan ☐ Pasal 9 ayat (6) PPN dibebaskan dengan ☐ Pengembalian Pembetulan					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MENDANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengisian Pajak Rp. 0,00 B. PPN Terutang Rp. 0,00 C. Dikur dari Tanggal (Monev) NTPN:					
IV. PERSAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI A. PPN yang wajib dikur dari tanggal 20190501 0 00 B. Dikur dari Tanggal (Monev) NTPN:					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. PPhBM yang harus dipungut sendiri B. PPhBM dikur dari total dasar Masa Pajak yang sama C. PPhBM kurang atau lebih bayar ((A - B) x 10) D. PPhBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan E. PPhBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan ((C - D) x 10) F. PPhBM kurang bayar dikur dari tanggal (Monev) NTPN:					
VI. KELENGKAPAN SPT ☒ Formulir 1111 A6 ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☒ SPT PPN-2 lembar ☐ Surat Kuasa Khusus ☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☒ SPT PPhBM-3 lembar ☐ , 0 lembar					
PERNYATAAN : DENGAN MENANDAI SEPENYUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAKSI, MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYKAT. ☒ PPh ☐ Rupa Tanda tangan: HANISEH Nama dan Jabatan: DIREKTUR Cap Perusahaan:					

F.12.32.04

Lampiran 12

SPT Masa PPN Juni 2019 Normal

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PPN		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																																																																																																																																																																																		
Nama PPN : PT SUMBER PANGAN MAKMUR BERSAMA		Nomor : 039-001008		- 017 000																																																																																																																																																																																		
Alamat : RUKO JATI REPUHINDAH BLOK F NO.08 RT 12 RW 03, KAS		Masa : 06 00 00 - 2019		Tribunal : 01 00 12																																																																																																																																																																																		
Telepon : 0812168 000258990000		KLU : 000		Wajib PPNBM																																																																																																																																																																																		
I. PENERAHAN BARANG DAN JASA																																																																																																																																																																																						
A. Terutang PPN: <table border="0"> <tr> <td>1. Dasar</td> <td>1.2</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyesuaian yang PPN nya harus dipungut sendiri</td> <td>2.1</td> <td>Rp</td> <td>1.677.480.000,00</td> <td>Rp</td> <td>167.748.000,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyesuaian yang PPN nya dipungut oleh (Pembayar PPN)</td> <td>3.1</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyesuaian yang PPN nya tidak dipungut</td> <td>4.1</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyesuaian yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td>5.1</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2</td> <td>Rp</td> <td>1.677.480.000,00</td> <td>Rp</td> <td>167.748.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Tidak Terutang PPN</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. Jumlah Seluruh Penyesuaian (1.2 + 1.2)</td> <td>Rp</td> <td>1.677.480.000,00</td> <td></td> </tr> </table>						1. Dasar	1.2	Rp	0,00			2. Penyesuaian yang PPN nya harus dipungut sendiri	2.1	Rp	1.677.480.000,00	Rp	167.748.000,00	3. Penyesuaian yang PPN nya dipungut oleh (Pembayar PPN)	3.1	Rp	0,00	Rp	0,00	4. Penyesuaian yang PPN nya tidak dipungut	4.1	Rp	0,00	Rp	0,00	5. Penyesuaian yang dibebaskan dari pengenaan PPN	5.1	Rp	0,00	Rp	0,00	Jumlah 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2			Rp	1.677.480.000,00	Rp	167.748.000,00	B. Tidak Terutang PPN			Rp	0,00		C. Jumlah Seluruh Penyesuaian (1.2 + 1.2)			Rp	1.677.480.000,00																																																																																																																																	
1. Dasar	1.2	Rp	0,00																																																																																																																																																																																			
2. Penyesuaian yang PPN nya harus dipungut sendiri	2.1	Rp	1.677.480.000,00	Rp	167.748.000,00																																																																																																																																																																																	
3. Penyesuaian yang PPN nya dipungut oleh (Pembayar PPN)	3.1	Rp	0,00	Rp	0,00																																																																																																																																																																																	
4. Penyesuaian yang PPN nya tidak dipungut	4.1	Rp	0,00	Rp	0,00																																																																																																																																																																																	
5. Penyesuaian yang dibebaskan dari pengenaan PPN	5.1	Rp	0,00	Rp	0,00																																																																																																																																																																																	
Jumlah 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2			Rp	1.677.480.000,00	Rp	167.748.000,00																																																																																																																																																																																
B. Tidak Terutang PPN			Rp	0,00																																																																																																																																																																																		
C. Jumlah Seluruh Penyesuaian (1.2 + 1.2)			Rp	1.677.480.000,00																																																																																																																																																																																		
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																																																																																																																																																																																						
A. Pajak Kikasan yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1.2) <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>Rp</td> <td>167.748.000,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN dikur dari dalam Masa Pajak yang sama</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Akuturan yang dapat dipotong</td> <td>5</td> <td>Rp</td> <td>292.834.700,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau lebih bayar (1.2 - 1.2 - 1.2)</td> <td>Rp</td> <td>-125.086.700,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan (1.2 - 1.2)</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>G. PPN kurang bayar dibayar tanggal</td> <td>(dd mm yyyy)</td> <td>NTPN:</td> </tr> <tr> <td>H. PPN lebih bayar pada:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>☒ B.1.1.1 (Dib. dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> <td>1.2</td> <td>☐ B.1.1.2 atau</td> <td>☐ B.1.1.3 (Dib. dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>☒ PPN Pasal 3 ayat (4) PPN</td> <td>2.2</td> <td>☐ Selain PPN Pasal 3 ayat (4) PPN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>3.2</td> <td>☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>☐ Dikembalikan (Pembetulan)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Risiko Retensi untuk PPN: <table border="0"> <tr> <td>☐ Pasal 17C KUP dibebaskan dengan:</td> <td>☐ Protesor Baku</td> <td>atau</td> <td>☐ Pengembalian Pembetulan</td> </tr> <tr> <td>☐ Pasal 17D KUP dibebaskan dengan:</td> <td>☐ Protesor Baku</td> <td>atau</td> <td>☐ Pengembalian Pembetulan</td> </tr> <tr> <td>☐ Pasal 17E ayat (4) PPN dibebaskan dengan Pengembalian Pembetulan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp 0,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> B. PPN Terutang : Rp 0,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> C. Dibayar Tanggal : (dd mm yyyy) NTPN: </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> A. PPN yang wajib dikembalikan : Rp 0,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> B. Dibayar Tanggal : (dd mm yyyy) NTPN: </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> A. PPNBM yang harus dipungut sendiri <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPNBM dikur dari dalam Masa Pajak yang sama</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C. PPNBM kurang atau lebih bayar (1.2 - 1.2)</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPNBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPNBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan (1.2 - 1.2)</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPNBM kurang bayar dibayar tanggal</td> <td>(dd mm yyyy)</td> <td>NTPN:</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> VI. KELENGKAPAN SPT </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> <table border="0"> <tr> <td>☒ Formulir 1111.A</td> <td>☒ Formulir 1111.B</td> <td>☒ Formulir 1111.C</td> <td>☐ SSP PPN 0</td> <td>atau</td> <td>☐ Surat Saksi Risiko</td> </tr> <tr> <td>☒ Formulir 1111.A</td> <td>☒ Formulir 1111.B</td> <td>☒ Formulir 1111.C</td> <td>☐ SSP PPN 0</td> <td>atau</td> <td>☐ 0 (nol)</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> PERNYATAAN : DENGAN MEMYATAKAN SEPENUHNYA AKAN SEJALA ASBATNYA, SAKA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERESITA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSAMAR. <table border="0"> <tr> <td>☒ PKP</td> <td>Tanda tangan :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Bukan</td> <td>Nama Jelas :</td> <td>HW/0201</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jabatan :</td> <td>DIREKTUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cat. Pembetulan :</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>						1	Rp	167.748.000,00	B. PPN dikur dari dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0,00	C. Pajak Akuturan yang dapat dipotong	5	Rp	292.834.700,00	D. PPN kurang atau lebih bayar (1.2 - 1.2 - 1.2)	Rp	-125.086.700,00	E. PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp	0,00	F. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan (1.2 - 1.2)	Rp	0,00	G. PPN kurang bayar dibayar tanggal	(dd mm yyyy)	NTPN:	H. PPN lebih bayar pada:			1.1	☒ B.1.1.1 (Dib. dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2	☐ B.1.1.2 atau	☐ B.1.1.3 (Dib. dalam hal SPT Pembetulan)	2.1	☒ PPN Pasal 3 ayat (4) PPN	2.2	☐ Selain PPN Pasal 3 ayat (4) PPN		3.1	☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3.2	☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak		3.3	☐ Dikembalikan (Pembetulan)				Risiko Retensi untuk PPN: <table border="0"> <tr> <td>☐ Pasal 17C KUP dibebaskan dengan:</td> <td>☐ Protesor Baku</td> <td>atau</td> <td>☐ Pengembalian Pembetulan</td> </tr> <tr> <td>☐ Pasal 17D KUP dibebaskan dengan:</td> <td>☐ Protesor Baku</td> <td>atau</td> <td>☐ Pengembalian Pembetulan</td> </tr> <tr> <td>☐ Pasal 17E ayat (4) PPN dibebaskan dengan Pengembalian Pembetulan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						☐ Pasal 17C KUP dibebaskan dengan:	☐ Protesor Baku	atau	☐ Pengembalian Pembetulan	☐ Pasal 17D KUP dibebaskan dengan:	☐ Protesor Baku	atau	☐ Pengembalian Pembetulan	☐ Pasal 17E ayat (4) PPN dibebaskan dengan Pengembalian Pembetulan				III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI						A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp 0,00						B. PPN Terutang : Rp 0,00						C. Dibayar Tanggal : (dd mm yyyy) NTPN:						IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI						A. PPN yang wajib dikembalikan : Rp 0,00						B. Dibayar Tanggal : (dd mm yyyy) NTPN:						V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH						A. PPNBM yang harus dipungut sendiri <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPNBM dikur dari dalam Masa Pajak yang sama</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C. PPNBM kurang atau lebih bayar (1.2 - 1.2)</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPNBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPNBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan (1.2 - 1.2)</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPNBM kurang bayar dibayar tanggal</td> <td>(dd mm yyyy)</td> <td>NTPN:</td> </tr> </table>						1	Rp	0,00	B. PPNBM dikur dari dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0,00	C. PPNBM kurang atau lebih bayar (1.2 - 1.2)	Rp	0,00	D. PPNBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp	0,00	E. PPNBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan (1.2 - 1.2)	Rp	0,00	F. PPNBM kurang bayar dibayar tanggal	(dd mm yyyy)	NTPN:	VI. KELENGKAPAN SPT						<table border="0"> <tr> <td>☒ Formulir 1111.A</td> <td>☒ Formulir 1111.B</td> <td>☒ Formulir 1111.C</td> <td>☐ SSP PPN 0</td> <td>atau</td> <td>☐ Surat Saksi Risiko</td> </tr> <tr> <td>☒ Formulir 1111.A</td> <td>☒ Formulir 1111.B</td> <td>☒ Formulir 1111.C</td> <td>☐ SSP PPN 0</td> <td>atau</td> <td>☐ 0 (nol)</td> </tr> </table>						☒ Formulir 1111.A	☒ Formulir 1111.B	☒ Formulir 1111.C	☐ SSP PPN 0	atau	☐ Surat Saksi Risiko	☒ Formulir 1111.A	☒ Formulir 1111.B	☒ Formulir 1111.C	☐ SSP PPN 0	atau	☐ 0 (nol)	PERNYATAAN : DENGAN MEMYATAKAN SEPENUHNYA AKAN SEJALA ASBATNYA, SAKA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERESITA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSAMAR. <table border="0"> <tr> <td>☒ PKP</td> <td>Tanda tangan :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Bukan</td> <td>Nama Jelas :</td> <td>HW/0201</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jabatan :</td> <td>DIREKTUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cat. Pembetulan :</td> <td></td> </tr> </table>						☒ PKP	Tanda tangan :		☐ Bukan	Nama Jelas :	HW/0201		Jabatan :	DIREKTUR		Cat. Pembetulan :	
1	Rp	167.748.000,00																																																																																																																																																																																				
B. PPN dikur dari dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0,00																																																																																																																																																																																				
C. Pajak Akuturan yang dapat dipotong	5	Rp	292.834.700,00																																																																																																																																																																																			
D. PPN kurang atau lebih bayar (1.2 - 1.2 - 1.2)	Rp	-125.086.700,00																																																																																																																																																																																				
E. PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp	0,00																																																																																																																																																																																				
F. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan (1.2 - 1.2)	Rp	0,00																																																																																																																																																																																				
G. PPN kurang bayar dibayar tanggal	(dd mm yyyy)	NTPN:																																																																																																																																																																																				
H. PPN lebih bayar pada:																																																																																																																																																																																						
1.1	☒ B.1.1.1 (Dib. dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2	☐ B.1.1.2 atau	☐ B.1.1.3 (Dib. dalam hal SPT Pembetulan)																																																																																																																																																																																		
2.1	☒ PPN Pasal 3 ayat (4) PPN	2.2	☐ Selain PPN Pasal 3 ayat (4) PPN																																																																																																																																																																																			
3.1	☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3.2	☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak																																																																																																																																																																																			
3.3	☐ Dikembalikan (Pembetulan)																																																																																																																																																																																					
Risiko Retensi untuk PPN: <table border="0"> <tr> <td>☐ Pasal 17C KUP dibebaskan dengan:</td> <td>☐ Protesor Baku</td> <td>atau</td> <td>☐ Pengembalian Pembetulan</td> </tr> <tr> <td>☐ Pasal 17D KUP dibebaskan dengan:</td> <td>☐ Protesor Baku</td> <td>atau</td> <td>☐ Pengembalian Pembetulan</td> </tr> <tr> <td>☐ Pasal 17E ayat (4) PPN dibebaskan dengan Pengembalian Pembetulan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						☐ Pasal 17C KUP dibebaskan dengan:	☐ Protesor Baku	atau	☐ Pengembalian Pembetulan	☐ Pasal 17D KUP dibebaskan dengan:	☐ Protesor Baku	atau	☐ Pengembalian Pembetulan	☐ Pasal 17E ayat (4) PPN dibebaskan dengan Pengembalian Pembetulan																																																																																																																																																																								
☐ Pasal 17C KUP dibebaskan dengan:	☐ Protesor Baku	atau	☐ Pengembalian Pembetulan																																																																																																																																																																																			
☐ Pasal 17D KUP dibebaskan dengan:	☐ Protesor Baku	atau	☐ Pengembalian Pembetulan																																																																																																																																																																																			
☐ Pasal 17E ayat (4) PPN dibebaskan dengan Pengembalian Pembetulan																																																																																																																																																																																						
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																																																																																																																																																																						
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp 0,00																																																																																																																																																																																						
B. PPN Terutang : Rp 0,00																																																																																																																																																																																						
C. Dibayar Tanggal : (dd mm yyyy) NTPN:																																																																																																																																																																																						
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																																																																																																																																																																																						
A. PPN yang wajib dikembalikan : Rp 0,00																																																																																																																																																																																						
B. Dibayar Tanggal : (dd mm yyyy) NTPN:																																																																																																																																																																																						
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																																																																																																																																																																						
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPNBM dikur dari dalam Masa Pajak yang sama</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C. PPNBM kurang atau lebih bayar (1.2 - 1.2)</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPNBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPNBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan (1.2 - 1.2)</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPNBM kurang bayar dibayar tanggal</td> <td>(dd mm yyyy)</td> <td>NTPN:</td> </tr> </table>						1	Rp	0,00	B. PPNBM dikur dari dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0,00	C. PPNBM kurang atau lebih bayar (1.2 - 1.2)	Rp	0,00	D. PPNBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp	0,00	E. PPNBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan (1.2 - 1.2)	Rp	0,00	F. PPNBM kurang bayar dibayar tanggal	(dd mm yyyy)	NTPN:																																																																																																																																																															
1	Rp	0,00																																																																																																																																																																																				
B. PPNBM dikur dari dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0,00																																																																																																																																																																																				
C. PPNBM kurang atau lebih bayar (1.2 - 1.2)	Rp	0,00																																																																																																																																																																																				
D. PPNBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp	0,00																																																																																																																																																																																				
E. PPNBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan (1.2 - 1.2)	Rp	0,00																																																																																																																																																																																				
F. PPNBM kurang bayar dibayar tanggal	(dd mm yyyy)	NTPN:																																																																																																																																																																																				
VI. KELENGKAPAN SPT																																																																																																																																																																																						
<table border="0"> <tr> <td>☒ Formulir 1111.A</td> <td>☒ Formulir 1111.B</td> <td>☒ Formulir 1111.C</td> <td>☐ SSP PPN 0</td> <td>atau</td> <td>☐ Surat Saksi Risiko</td> </tr> <tr> <td>☒ Formulir 1111.A</td> <td>☒ Formulir 1111.B</td> <td>☒ Formulir 1111.C</td> <td>☐ SSP PPN 0</td> <td>atau</td> <td>☐ 0 (nol)</td> </tr> </table>						☒ Formulir 1111.A	☒ Formulir 1111.B	☒ Formulir 1111.C	☐ SSP PPN 0	atau	☐ Surat Saksi Risiko	☒ Formulir 1111.A	☒ Formulir 1111.B	☒ Formulir 1111.C	☐ SSP PPN 0	atau	☐ 0 (nol)																																																																																																																																																																					
☒ Formulir 1111.A	☒ Formulir 1111.B	☒ Formulir 1111.C	☐ SSP PPN 0	atau	☐ Surat Saksi Risiko																																																																																																																																																																																	
☒ Formulir 1111.A	☒ Formulir 1111.B	☒ Formulir 1111.C	☐ SSP PPN 0	atau	☐ 0 (nol)																																																																																																																																																																																	
PERNYATAAN : DENGAN MEMYATAKAN SEPENUHNYA AKAN SEJALA ASBATNYA, SAKA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERESITA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSAMAR. <table border="0"> <tr> <td>☒ PKP</td> <td>Tanda tangan :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Bukan</td> <td>Nama Jelas :</td> <td>HW/0201</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jabatan :</td> <td>DIREKTUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cat. Pembetulan :</td> <td></td> </tr> </table>						☒ PKP	Tanda tangan :		☐ Bukan	Nama Jelas :	HW/0201		Jabatan :	DIREKTUR		Cat. Pembetulan :																																																																																																																																																																						
☒ PKP	Tanda tangan :																																																																																																																																																																																					
☐ Bukan	Nama Jelas :	HW/0201																																																																																																																																																																																				
	Jabatan :	DIREKTUR																																																																																																																																																																																				
	Cat. Pembetulan :																																																																																																																																																																																					

F.1.2.32.04

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran 13

SPT Masa PPN Juni 2019 Pembetulan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)		FORMULIR 1111	
Nama PPN : PT BUMBUH PANGKALAN MAKAMUT BERSAMA		Server : 820461030		- 617 000	
Alamat : RUMAH JATI KUPUH WEDAH BLOK F NO 06 RT 12 RW 03, KAS.		Masa : 00 + 00 + 2019		Periode : 01 s.d. 02	
Telepon : 0842158		NIP : 00026800089		Pembetulan No. 1 484	
				☐ Wajib PPNBM	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
A. Tarif PPN:					
1. Barang: 0,00					
2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri: 1.820.400.000,00					
3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN: 0,00					
4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut: 0,00					
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN: 0,00					
Jumlah (1 + 2 + 3 + 4 + 5): 1.820.400.000,00					
6. Tidak Terutang PPN: 0,00					
7. Jumlah Setelah Penyerahan (2 + 3 + 4): 1.820.400.000,00					
II. PENGHUTUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Kalkulasi yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.2): 162.946.800,00					
B. PPN dibayar dimuka dalam Masa Pajak yang sama: 0,00					
C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggungjawabkan: 250.547.311,00					
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (A - B - C): -110.601.311,00					
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan: 0,00					
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (D - E): -110.601.311,00					
G. PPN kurang bayar dibayar lengkap: (dalam rupiah) NTPN:					
H. PPN lebih bayar pada:					
1.1. Sub E.O. (dikurangkan dari SPT tahun Pembetulan): 1.2. Sub E.O. : atau:					
Dikur: 2.1. PPN Pasal 9 ayat (4) (PPN) atau: 2.2. Sisa PPN Pasal 9 ayat (4) (PPN)					
dikur: 3.1. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau: 3.2. Dikembalikan (Refund)					
Khusus Refund untuk PPN:					
atau Pasal 17C KUP dibebaskan dengan: atau Prosedur Baku atau Pengembalian Pendahuluan					
atau Pasal 17D KUP dibebaskan dengan: atau Prosedur Baku atau Pengembalian Pendahuluan					
atau Pasal 9 ayat (4) PPN dibebaskan dengan Pengembalian Pendahuluan					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak: Rp. 0,00					
B. PPN Terutang: Rp. 0,00					
C. Dibayar Lengkap: (dalam rupiah) NTPN:					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK BASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dibayar kembali: Rp. 0,00					
B. Dibayar Lengkap: (dalam rupiah) NTPN:					
V. PAJAK PENGULIAN ATAS BARANG MIAWAH					
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri: 0,00					
B. PPNBM dibayar dimuka dalam Masa Pajak yang sama: 0,00					
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (A - B): 0,00					
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan: 0,00					
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (C - D): 0,00					
F. PPNBM kurang bayar dibayar lengkap: (dalam rupiah) NTPN:					
VI. KELENGKAPAN SPT					
☒ Formulir 1111 AB ☒ Formulir 1111 AJ ☒ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN 0 lembar ☐ Surat Kuasa Khusus					
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPNBM 0 lembar ☐					
KAB. BOGOR 09-03-2019 (dalam rupiah)					
PERNYATAAN :					
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA KONSEKUSI, SAYA MENYATAKAN BAHWA AKU YANG TELAH SAYA BERITAHKAN DI ATAS BERSAMA LAMPIRAN/ASPRAS/ANALADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYAKAT.					
Tanda tangan: ☒ PKP Nama Jalan: HANSEN					
☐ Kasta Jabatan: DIREKTUR					
Cap Perusahaan:					

F.2.2.22.04

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran 14

SPT Masa PPN Juli 2019 Normal

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
Nama/Peserta : PT SUMBER PANGAN MAKMUR BERSAMA		Nomor : 809467036		Tgl. : 017 000	
Alamat : RUMAH JATI NEPUH INDAH BLOK F MD DE RT 12 RW 03, KAB. BOJONEgara		Masa : 07 01 02 2019		Periode : 01 Jul 12	
Telepon : 0822180 141 08220889088		Kode : 0000000000		Wajib PPN/BM	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
A. Tarif Pajak PPN					
1. Dasar : ☒ Rp 0,00					
2. Persentase yang PPN-nya harus dipungut sendiri : ☐ Rp 2.821.260.000,00					
3. Persentase yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN : ☐ Rp 0,00					
4. Persentase yang PPN-nya tidak dipungut : ☐ Rp 0,00					
5. Persentase yang dibebaskan dan pengenaan PPN : ☐ Rp 0,00					
Jumlah P. A + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 : ☐ Rp 2.821.260.000,00					
B. Tarif Pajak PPN : ☐ Rp 0,00					
C. Jumlah Sisa Pajak Persentase (A + B) : ☐ Rp 2.821.260.000,00					
II. PENGHUTONGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Masukan yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada LAJ) : ☐ Rp 292.128.000,00					
B. PPN Masukan yang dikurangkan Masa Pajak yang sama : ☐ Rp 0,00					
C. Pajak Masukan yang dapat dikurangkan : ☐ Rp 292.264.219,00					
D. PPN Masukan yang lebih bayar (A - B - C) : ☐ Rp -36.236.219,00					
E. PPN Masukan yang lebih bayar pada SPT yang dibebaskan : ☐ Rp 0,00					
F. PPN Masukan yang lebih bayar karena pertambahan (D - E) : ☐ Rp 0,00					
G. PPN Masukan yang dibayar lebih : ☐ Rp 0,00					
H. PPN Masukan yang lebih bayar : ☐ Rp 0,00					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : ☐ Rp 0,00					
B. PPN Terutang : ☐ Rp 0,00					
C. Dibayar Lebih : ☐ Rp 0,00					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAKI PKP GABUNG BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dibayar kembali : ☐ Rp 0,00					
B. Dibayar Lebih : ☐ Rp 0,00					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPN yang harus dipungut sendiri : ☐ Rp 0,00					
B. PPN Masukan yang dikurangkan Masa Pajak yang sama : ☐ Rp 0,00					
C. PPN Masukan yang lebih bayar (A - B) : ☐ Rp 0,00					
D. PPN Masukan yang lebih bayar pada SPT yang dibebaskan : ☐ Rp 0,00					
E. PPN Masukan yang lebih bayar karena pertambahan (C - D) : ☐ Rp 0,00					
F. PPN Masukan yang dibayar lebih : ☐ Rp 0,00					
VI. KELOMPOK SPT					
☒ Formulir 1111A ☒ Formulir 1111B ☒ Formulir 1111C ☐ SSP PPN 0 ☐ BUKU KASUS KURANG					
☒ Formulir 1111A ☒ Formulir 1111B ☒ Formulir 1111C ☐ SSP PPN 0 ☐ BUKU KASUS KURANG					
PERNYATAAN :					
DENGAN MENYADARI BERSAMA SAMA SEGALA KESADARIAN, SUDAH MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYAKAT.					
Tanda tangan : ☒ PPK ☐ KAS ☐ KAS ☐ KAS					
Nama Jelas : HANONG					
Jabatan : DIREKTUR					
Cap Perusahaan :					

R1 2.22.04

Lampiran 15

SPT Masa PPN Juli 2019 Pembetulan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
Nama PPN : PT SUMBER PANGAN MAKMUR BERSAMA		Jenis : 830481936		- 817 000	
Alamat : RUMAH JATI KEMUNING BLOK F NO 08 RT 12 RW 03, KAB. BOJONEgara		Masa : 07 01 2019		Jenis : 01 01 12	
TIN : 0042930		NPWP : 00229990000		Periode : 1 01 2019	
				Wajib PPhBM	
E. PENERAYUAN BARANG DAN JASA					
A. Tentang PPN:					
1. Ekspor ☒ Rp. 0,00					
2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri ☒ Rp. 3.321.286.000,00 Rp. 332.128.600,00					
3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN ☒ Rp. 0,00 Rp. 0,00					
4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut ☒ Rp. 0,00 Rp. 0,00					
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN ☒ Rp. 0,00 Rp. 0,00					
Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5) Rp. 3.321.286.000,00 Rp. 332.128.600,00					
B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00					
C. Jumlah Baku Pajak (A + B) Rp. 3.321.286.000,00					
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada A.2) ☒ Rp. 332.128.600,00					
B. PPN dikur dari pada Masa Pajak yang sama Rp. 0,00					
C. Pajak Keluaran yang dapat dipotong ☒ Rp. 331.588.878,00					
D. PPN kurang atau lebih) bayar (A - B - C) Rp. 839.722,00					
E. PPN kurang atau lebih) bayar pada SPT yang dibulatkan Rp. 0,00					
F. PPN kurang atau lebih) bayar karena pembetulan (B - E) Rp. 839.722,00					
G. PPN kurang bayar (kurang tanggal 20/05/2019) NTPN : 68EPB101H413V88V					
H. PPN lebih bayar pada :					
1. ☐ Bulat B.D (Dikur dari SPT tahun Pembetulan) 1.2 ☐ Bulat B.D atau ☐ Bulat B.F (Dikur dari SPT Pembetulan)					
Dikur dari : 2.1 ☐ PPh Pasal 8 ayat (4b) PPh atau 2.2 ☐ Saldo PPh Pasal 8 ayat (4b) PPh					
dikur dari : 3.1 ☐ Dikur dari ke Masa Pajak lebih awal atau ☐ Dikur dari ke Masa Pajak					
3.2 ☐ Dikur dari (Pembetulan)					
Dikur dari untuk PPh :					
☐ Pasal 10 KUP ditukarkan dengan ☐ Prosedur Baru atau ☐ Pengembalian Pembetulan					
☐ Pasal 17(1) KUP ditukarkan dengan ☐ Prosedur Baru atau ☐ Pengembalian Pembetulan					
☐ Pasal 8 ayat (4c) PPh ditukarkan dengan Pengembalian Pembetulan					
III. PPN TERUTANG AKAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp. 0,00					
B. PPN Terutang Rp. 0,00					
C. Dikur Tanggal (seluruhnya) NTPN :					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAJAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dikur kembali Rp. 0,00					
B. Dikur Tanggal (seluruhnya) NTPN :					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri ☒ Rp. 0,00					
B. PPhBM dikur dari pada Masa Pajak yang sama Rp. 0,00					
C. PPhBM kurang atau lebih) bayar (A - B) Rp. 0,00					
D. PPhBM kurang atau lebih) bayar pada SPT yang dibulatkan Rp. 0,00					
E. PPhBM kurang atau lebih) bayar karena pembetulan (A - B) Rp. 0,00					
F. PPhBM kurang bayar (kurang tanggal) (seluruhnya) NTPN :					
VI. KELENGKAPAN SPT					
☒ Formulir 1111.AB ☒ Formulir 1111.A2 ☒ Formulir 1111.B2 ☒ SSP PPhBM 1 lembar ☐ Surat Kuasa Khusus					
☒ Formulir 1111.A1 ☒ Formulir 1111.B1 ☒ Formulir 1111.B3 ☒ SSP PPhBM 2 lembar ☐ 0 lembar					
PERNYATAAN :					
DENGAN MEMPADAM SEPENYUHAN SERTA SEGALA AKSI/TAQ, SAKA, MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAKA BERTAMBAH DI ATAS, BESERTA LAMPIRAN/CAKUPAN/TAQ ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSARA					
Tanda tangan : ☒ PPh ☐ Kuita					
Nama Jelas : HANESHI					
Jabatan : DIREKTUR					
Cap Pembetulan :					

F.1.2.32.88

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran 16

SPT Masa PPN Agustus 2019 Normal

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
REVISI: 1.0 (1.0.2019)		Revisi: 1.0 (1.0.2019)		Revisi: 1.0 (1.0.2019)	
NAMA PPN : PT SUMBER PAJAN MAKUR BERSAMA		Jenis : 009-001000		- 017 000	
ALAMAT : RUKO JATI KEPUH INDAH BLOK F NO.03 RT 12 RW 03, KAS		Masa : 08 2019		Tahun : 01 2019	
TELEPON : 0812108		NIP : 000258990000		Pembayar : 0 (00)	
				☐ Wajib PPNBM	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
A. Tentang PPN:					
1. Dasar		Rp 0,00		Rp 0,00	
2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri		Rp 3.027.940.000,00		Rp 302.794.000,00	
3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh (Pembayar PPN)		Rp 0,00		Rp 0,00	
4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut		Rp 0,00		Rp 0,00	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		Rp 0,00		Rp 0,00	
Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5)		Rp 3.027.940.000,00		Rp 302.794.000,00	
6. Tidak Tentang PPN		Rp 0,00		Rp 0,00	
7. Jumlah Seluruh Penyerahan (A.1 + I.3)		Rp 3.027.940.000,00		Rp 302.794.000,00	
II. PENGHUTUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Kikasan yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA.2)		Rp 302.794.000,00		Rp 0,00	
B. PPN dikur dari dalam Masa Pajak yang sama		Rp 0,00		Rp 0,00	
C. Pajak Akutasi yang dapat dipotong		Rp 294.890.500,00		Rp 7.900.107,00	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (LA - II.B - II.C)		Rp 0,00		Rp 0,00	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan		Rp 0,00		Rp 0,00	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp 0,00		Rp 0,00	
G. PPN kurang bayar (lebih) tanggal 30/09/19 0.00		(di isi dengan)		NTPN : 0000001155FENTUF	
H. PPN lebih bayar pada :					
1.1 ☐ Sub E.D (Dib dalam SPT bukan Pembetulan)		1.2 ☐ Sub E.D atau		☐ Sub E.F (Dib dalam SPT Pembetulan)	
Dikur 2.1 ☐ PPN Pasal 2 ayat (4) PPN		atau		2.2 ☐ Selain PPN Pasal 2 ayat (4) PPN	
dikur 3.1 ☐ Dikur persentase ke Masa Pajak berikutnya		atau		☐ Dikur persentase ke Masa Pajak	
3.2 ☐ Dikur persentase (Pembetulan)					
Kikur Revisi untuk PPN :					
☐ Pasal 17C KUP dikur dengan :		☐ Prosedur Biasa atau		☐ Pengembalian Pembetulan	
atau ☐ Pasal 17D KUP dikur dengan :		☐ Prosedur Biasa atau		☐ Pengembalian Pembetulan	
atau ☐ Pasal 18 ayat (4) PPN dikur dengan Pengembalian Pembetulan					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak		Rp 0,00		Rp 0,00	
B. PPN Tentang		Rp 0,00		Rp 0,00	
C. Dikur Tanggal		(di isi dengan)		NTPN :	
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dikur kembali		Rp 0,00		Rp 0,00	
B. Dikur Tanggal		(di isi dengan)		NTPN :	
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri		Rp 0,00		Rp 0,00	
B. PPNBM dikur dari dalam Masa Pajak yang sama		Rp 0,00		Rp 0,00	
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (VA - V.B)		Rp 0,00		Rp 0,00	
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan		Rp 0,00		Rp 0,00	
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp 0,00		Rp 0,00	
F. PPNBM kurang bayar (lebih) tanggal		(di isi dengan)		NTPN :	
VI. KELENGKAPAN SPT					
☐ Formulir 1111.08		☐ Formulir 1111.02		☐ Formulir 1111.02	
☐ Formulir 1111.01		☐ Formulir 1111.01		☐ Formulir 1111.01	
☐ SSP PPN 1		☐ SSP PPN 1		☐ SSP PPN 1	
☐ SSP PPN 2		☐ SSP PPN 2		☐ SSP PPN 2	
☐ SSP PPN 3		☐ SSP PPN 3		☐ SSP PPN 3	
☐ SSP PPN 4		☐ SSP PPN 4		☐ SSP PPN 4	
☐ SSP PPN 5		☐ SSP PPN 5		☐ SSP PPN 5	
☐ SSP PPN 6		☐ SSP PPN 6		☐ SSP PPN 6	
☐ SSP PPN 7		☐ SSP PPN 7		☐ SSP PPN 7	
☐ SSP PPN 8		☐ SSP PPN 8		☐ SSP PPN 8	
☐ SSP PPN 9		☐ SSP PPN 9		☐ SSP PPN 9	
☐ SSP PPN 10		☐ SSP PPN 10		☐ SSP PPN 10	
☐ SSP PPN 11		☐ SSP PPN 11		☐ SSP PPN 11	
☐ SSP PPN 12		☐ SSP PPN 12		☐ SSP PPN 12	
☐ SSP PPN 13		☐ SSP PPN 13		☐ SSP PPN 13	
☐ SSP PPN 14		☐ SSP PPN 14		☐ SSP PPN 14	
☐ SSP PPN 15		☐ SSP PPN 15		☐ SSP PPN 15	
☐ SSP PPN 16		☐ SSP PPN 16		☐ SSP PPN 16	
☐ SSP PPN 17		☐ SSP PPN 17		☐ SSP PPN 17	
☐ SSP PPN 18		☐ SSP PPN 18		☐ SSP PPN 18	
☐ SSP PPN 19		☐ SSP PPN 19		☐ SSP PPN 19	
☐ SSP PPN 20		☐ SSP PPN 20		☐ SSP PPN 20	
☐ SSP PPN 21		☐ SSP PPN 21		☐ SSP PPN 21	
☐ SSP PPN 22		☐ SSP PPN 22		☐ SSP PPN 22	
☐ SSP PPN 23		☐ SSP PPN 23		☐ SSP PPN 23	
☐ SSP PPN 24		☐ SSP PPN 24		☐ SSP PPN 24	
☐ SSP PPN 25		☐ SSP PPN 25		☐ SSP PPN 25	
☐ SSP PPN 26		☐ SSP PPN 26		☐ SSP PPN 26	
☐ SSP PPN 27		☐ SSP PPN 27		☐ SSP PPN 27	
☐ SSP PPN 28		☐ SSP PPN 28		☐ SSP PPN 28	
☐ SSP PPN 29		☐ SSP PPN 29		☐ SSP PPN 29	
☐ SSP PPN 30		☐ SSP PPN 30		☐ SSP PPN 30	
☐ SSP PPN 31		☐ SSP PPN 31		☐ SSP PPN 31	
☐ SSP PPN 32		☐ SSP PPN 32		☐ SSP PPN 32	
☐ SSP PPN 33		☐ SSP PPN 33		☐ SSP PPN 33	
☐ SSP PPN 34		☐ SSP PPN 34		☐ SSP PPN 34	
☐ SSP PPN 35		☐ SSP PPN 35		☐ SSP PPN 35	
☐ SSP PPN 36		☐ SSP PPN 36		☐ SSP PPN 36	
☐ SSP PPN 37		☐ SSP PPN 37		☐ SSP PPN 37	
☐ SSP PPN 38		☐ SSP PPN 38		☐ SSP PPN 38	
☐ SSP PPN 39		☐ SSP PPN 39		☐ SSP PPN 39	
☐ SSP PPN 40		☐ SSP PPN 40		☐ SSP PPN 40	
☐ SSP PPN 41		☐ SSP PPN 41		☐ SSP PPN 41	
☐ SSP PPN 42		☐ SSP PPN 42		☐ SSP PPN 42	
☐ SSP PPN 43		☐ SSP PPN 43		☐ SSP PPN 43	
☐ SSP PPN 44		☐ SSP PPN 44		☐ SSP PPN 44	
☐ SSP PPN 45		☐ SSP PPN 45		☐ SSP PPN 45	
☐ SSP PPN 46		☐ SSP PPN 46		☐ SSP PPN 46	
☐ SSP PPN 47		☐ SSP PPN 47		☐ SSP PPN 47	
☐ SSP PPN 48		☐ SSP PPN 48		☐ SSP PPN 48	
☐ SSP PPN 49		☐ SSP PPN 49		☐ SSP PPN 49	
☐ SSP PPN 50		☐ SSP PPN 50		☐ SSP PPN 50	
☐ SSP PPN 51		☐ SSP PPN 51		☐ SSP PPN 51	
☐ SSP PPN 52		☐ SSP PPN 52		☐ SSP PPN 52	
☐ SSP PPN 53		☐ SSP PPN 53		☐ SSP PPN 53	
☐ SSP PPN 54		☐ SSP PPN 54		☐ SSP PPN 54	
☐ SSP PPN 55		☐ SSP PPN 55		☐ SSP PPN 55	
☐ SSP PPN 56		☐ SSP PPN 56		☐ SSP PPN 56	
☐ SSP PPN 57		☐ SSP PPN 57		☐ SSP PPN 57	
☐ SSP PPN 58		☐ SSP PPN 58		☐ SSP PPN 58	
☐ SSP PPN 59		☐ SSP PPN 59		☐ SSP PPN 59	
☐ SSP PPN 60		☐ SSP PPN 60		☐ SSP PPN 60	
☐ SSP PPN 61		☐ SSP PPN 61		☐ SSP PPN 61	
☐ SSP PPN 62		☐ SSP PPN 62		☐ SSP PPN 62	
☐ SSP PPN 63		☐ SSP PPN 63		☐ SSP PPN 63	
☐ SSP PPN 64		☐ SSP PPN 64		☐ SSP PPN 64	
☐ SSP PPN 65		☐ SSP PPN 65		☐ SSP PPN 65	
☐ SSP PPN 66		☐ SSP PPN 66		☐ SSP PPN 66	
☐ SSP PPN 67		☐ SSP PPN 67		☐ SSP PPN 67	
☐ SSP PPN 68		☐ SSP PPN 68		☐ SSP PPN 68	
☐ SSP PPN 69		☐ SSP PPN 69		☐ SSP PPN 69	
☐ SSP PPN 70		☐ SSP PPN 70		☐ SSP PPN 70	
☐ SSP PPN 71		☐ SSP PPN 71		☐ SSP PPN 71	
☐ SSP PPN 72		☐ SSP PPN 72		☐ SSP PPN 72	
☐ SSP PPN 73		☐ SSP PPN 73		☐ SSP PPN 73	
☐ SSP PPN 74		☐ SSP PPN 74		☐ SSP PPN 74	
☐ SSP PPN 75		☐ SSP PPN 75		☐ SSP PPN 75	
☐ SSP PPN 76		☐ SSP PPN 76		☐ SSP PPN 76	
☐ SSP PPN 77		☐ SSP PPN 77		☐ SSP PPN 77	
☐ SSP PPN 78		☐ SSP PPN 78		☐ SSP PPN 78	
☐ SSP PPN 79		☐ SSP PPN 79		☐ SSP PPN 79	
☐ SSP PPN 80		☐ SSP PPN 80		☐ SSP PPN 80	
☐ SSP PPN 81		☐ SSP PPN 81		☐ SSP PPN 81	
☐ SSP PPN 82		☐ SSP PPN 82		☐ SSP PPN 82	
☐ SSP PPN 83		☐ SSP PPN 83		☐ SSP PPN 83	
☐ SSP PPN 84		☐ SSP PPN 84		☐ SSP PPN 84	
☐ SSP PPN 85		☐ SSP PPN 85		☐ SSP PPN 85	
☐ SSP PPN 86		☐ SSP PPN 86		☐ SSP PPN 86	
☐ SSP PPN 87		☐ SSP PPN 87		☐ SSP PPN 87	
☐ SSP PPN 88		☐ SSP PPN 88		☐ SSP PPN 88	
☐ SSP PPN 89		☐ SSP PPN 89		☐ SSP PPN 89	
☐ SSP PPN 90		☐ SSP PPN 90		☐ SSP PPN 90	
☐ SSP PPN 91		☐ SSP PPN 91		☐ SSP PPN 91	
☐ SSP PPN 92		☐ SSP PPN 92		☐ SSP PPN 92	
☐ SSP PPN 93		☐ SSP PPN 93		☐ SSP PPN 93	
☐ SSP PPN 94		☐ SSP PPN 94		☐ SSP PPN 94	
☐ SSP PPN 95		☐ SSP PPN 95		☐ SSP PPN 95	
☐ SSP PPN 96		☐ SSP PPN 96		☐ SSP PPN 96	
☐ SSP PPN 97		☐ SSP PPN 97		☐ SSP PPN 97	
☐ SSP PPN 98		☐ SSP PPN 98		☐ SSP PPN 98	
☐ SSP PPN 99		☐ SSP PPN 99		☐ SSP PPN 99	
☐ SSP PPN 100		☐ SSP PPN 100		☐ SSP PPN 100	
☐ SSP PPN 101		☐ SSP PPN 101		☐ SSP PPN 101	
☐ SSP PPN 102		☐ SSP PPN 102		☐ SSP PPN 102	
☐ SSP PPN 103		☐ SSP PPN 103		☐ SSP PPN 103	
☐ SSP PPN 104		☐ SSP PPN 104		☐ SSP PPN 104	
☐ SSP PPN 105		☐ SSP PPN 105		☐ SSP PPN 105	
☐ SSP PPN 106		☐ SSP PPN 106		☐ SSP PPN 106	
☐ SSP PPN 107		☐ SSP PPN 107		☐ SSP PPN 107	
☐ SSP PPN 108		☐ SSP PPN 108		☐ SSP PPN 108	
☐ SSP PPN 109		☐ SSP PPN 109		☐ SSP PPN 109	
☐ SSP PPN 110		☐ SSP PPN 110		☐ SSP PPN 110	
☐ SSP PPN 111		☐ SSP PPN 111		☐ SSP PPN 111	
☐ SSP PPN 112		☐ SSP PPN 112		☐ SSP PPN 112	
☐ SSP PPN 113		☐ SSP PPN 113		☐ SSP PPN 113	
☐ SSP PPN 114		☐ SSP PPN 114		☐ SSP PPN 114	
☐ SSP PPN 115		☐ SSP PPN 115		☐ SSP PPN 115	
☐ SSP PPN 116		☐ SSP PPN 116		☐ SSP PPN 116	
☐ SSP PPN 117		☐ SSP PPN 117		☐ SSP PPN 117	
☐ SSP PPN 118		☐ SSP PPN 118		☐ SSP PPN 118	
☐ SSP PPN 119		☐ SSP PPN 119		☐ SSP PPN 119	
☐ SSP PPN 120		☐ SSP PPN 120		☐ SSP PPN 120	
☐ SSP PPN 121		☐ SSP PPN 121		☐ SSP PPN 121	
☐ SSP PPN 122		☐ SSP PPN 122		☐ SSP PPN 122	
☐ SSP PPN 123		☐ SSP PPN 123		☐ SSP PPN 123	
☐ SSP PPN 124		☐ SSP PPN 124		☐ SSP PPN 124	
☐ SSP PPN 125		☐ SSP PPN 125		☐ SSP PPN 125	
☐ SSP PPN 126		☐ SSP PPN 126		☐ SSP PPN 126	
☐ SSP PPN 127		☐ SSP PPN 127		☐ SSP PPN 127	
☐ SSP PPN 128		☐ SSP PPN 128		☐ SSP PPN 128	
☐ SSP PPN 129		☐ SSP PPN 129		☐ SSP PPN 129	
☐ SSP PPN 130		☐ SSP PPN 130		☐ SSP PPN 130	
☐ SSP PPN 131		☐ SSP PPN 131		☐ SSP PPN 131	
☐ SSP PPN 132		☐ SSP PPN 132		☐ SSP PPN 132	
☐ SSP PPN 133		☐ SSP PPN 133		☐ SSP PPN 133	
☐ SSP PPN 134		☐ SSP PPN 134		☐ SSP PPN 134	
☐ SSP PPN 135		☐ SSP			

Lampiran 17

SPT Masa PPN September 2019 Normal

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDRAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)		FORMULIR 1111	
Nama PPN : PT SUMBER PANGAN HANGMUR BERSAMA		Nomor : 008-901926		= 617 000	
Alamat : RUMAH JATI KEPUK HEDAH BLOK F NO 05 RT 12 RW 03, KAM		Masa : 09 - 09 - 2019		Periode : 01 - 09 - 12	
Telepon : 08229660000		Kode : 00229660000		Wajib PPNBM	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
A. Tambah PPN:					
1. PPN yang harus dipungut sendiri (1) Rp 0,00					
2. PPN yang harus dipungut sendiri (2) Rp 2.487.254.343,00					
3. PPN yang harus dipungut sendiri (3) Rp 0,00					
4. PPN yang harus dipungut sendiri (4) Rp 0,00					
5. PPN yang dibebaskan dari pengenaan PPN (5) Rp 0,00					
Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5) Rp 2.487.254.343,00					
B. Tidak Terutang PPN Rp 0,00					
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A + B) Rp 2.487.254.343,00					
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Kurang yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada A.2) Rp 2.487.254.343,00					
B. PPN dikur dari dalam Masa Pajak yang sama Rp 0,00					
C. Pajak Masukan yang dapat dipotong Rp 234.678.078,00					
D. PPN kurang atau lebih (bisa) bayar (A - B - C) Rp 15.047.263,00					
E. PPN kurang atau lebih (bisa) bayar pada SPT yang dibebaskan Rp 0,00					
F. PPN kurang atau lebih (bisa) bayar karena pembebasan (D - E) Rp 0,00					
G. PPN kurang bayar dikur dari tanggal 30/10/19 0,00					
H. PPN lebih bayar pada					
1.1 ☐ Sub E.D (Dikur dari SPT tahun Pembetulan) 1.2 ☐ Sub E.D atau ☐ Sub E.F (Dikur dari SPT Pembetulan)					
2.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN atau 2.2 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN					
3.1 ☐ Dikur dari SPT tahun Pembetulan atau 3.2 ☐ Dikur dari SPT tahun Pembetulan					
4.1 ☐ PPN Pasal 10 ayat (1) PPN atau 4.2 ☐ PPN Pasal 10 ayat (1) PPN					
5.1 ☐ PPN Pasal 10 ayat (1) PPN atau 5.2 ☐ PPN Pasal 10 ayat (1) PPN					
6.1 ☐ PPN Pasal 10 ayat (1) PPN atau 6.2 ☐ PPN Pasal 10 ayat (1) PPN					
7.1 ☐ PPN Pasal 10 ayat (1) PPN atau 7.2 ☐ PPN Pasal 10 ayat (1) PPN					
8.1 ☐ PPN Pasal 10 ayat (1) PPN atau 8.2 ☐ PPN Pasal 10 ayat (1) PPN					
9.1 ☐ PPN Pasal 10 ayat (1) PPN atau 9.2 ☐ PPN Pasal 10 ayat (1) PPN					
10.1 ☐ PPN Pasal 10 ayat (1) PPN atau 10.2 ☐ PPN Pasal 10 ayat (1) PPN					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp 0,00					
B. PPN Terutang : Rp 0,00					
C. Dikur dari tanggal :					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PPN GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp 0,00					
B. Dikur dari tanggal :					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri Rp 0,00					
B. PPNBM dikur dari dalam Masa Pajak yang sama Rp 0,00					
C. PPNBM kurang atau lebih (bisa) bayar (A - B) Rp 0,00					
D. PPNBM kurang atau lebih (bisa) bayar pada SPT yang dibebaskan Rp 0,00					
E. PPNBM kurang atau lebih (bisa) bayar karena pembebasan (C - D) Rp 0,00					
F. PPNBM kurang bayar dikur dari tanggal :					
VI. KELENGKAPAN SPT					
☒ Formulir 1111 A ☒ Formulir 1111 B ☒ Formulir 1111 C ☒ SSP PPN 1 ☐ Bukti Kenaikan Pajak					
☒ Formulir 1111 D ☒ Formulir 1111 E ☒ Formulir 1111 F ☐ SSP PPN 2 ☐ Bukti Kenaikan Pajak					
PERNYATAAN :					
DENGAN MENYADAI SEPENYUSUKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA KERTUHARAN DI ATAS BERSEKUTU LAMPIRAN/LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JEJAS DAN TIDAK BERSYARAT.					
Tanda tangan : ☒ PPN ☐ Muka					
Nama : HANSEN					
Jabatan : DIREKTUR					
Cap/Pencetakan :					
KAS: REDUNDANT 28-10-2019					

Lampiran 18

SPT Masa PPN Oktober 2019 Normal

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																																				
REKOR PPN: PT SUMBER PANGAN MAJUM BERSAMA ALAMAT: JALAN JATI KAPUR BLOK F NO 88 RT 12 RW 03, KAS TELEPON: 082290000000																																						
Periode: 10/10/2019 - 31/10/2019 Wajib PPNBM																																						
I. PENERAHAN BARANG DAN JASA A. Terbilang PPN: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Barang/Jasa</th> <th>PPN</th> <th>PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Export</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri</td> <td>2.257.708.000,00</td> <td>220.770.800,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah (A 1 + (A 2 + A 3) + (A 4 + A 5))</td> <td>2.257.708.000,00</td> <td>220.770.800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B. Total Terbilang PPN</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C. Jumlah Setoran Persewaan (JA + IB)</td> <td>2.257.708.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> II. PENGHUTUNGAN PPN KURANG BAKUKURSIH BAYAR A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada LA2) B. PPN ekspor dan/atau dalam Masa Pajak yang sama C. Pajak Masukan yang dapat dikurangkan: D. PPN kurang atau (lebih) bayar (LA - IB - B2) E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (B2 - B2C) G. PPN kurang bayar dikurangkan dengan: 221.111.000 (dalam rupiah) NTPN: 10022900000000 H. PPN lebih bayar pada: 1.1 ☐ Sub E D (Dikurangkan dari SPT tahun Pembetulan) 1.2 ☐ Sub E D atau ☐ Sub E F (Dikurangkan dari SPT Pembetulan) Dikurangkan dengan: 1.1 ☐ PPN Pasal 9 ayat (1) PPN 1.2 ☐ Dikurangkan ke Masa Pajak berikutnya 1.3 ☐ Dikurangkan ke Masa Pajak berikutnya 1.4 ☐ PPN Pasal 17C KUP (dikurangkan dengan: Produk Baku atau Pengurangan Produk Baku) 1.5 ☐ PPN Pasal 17D KUP (dikurangkan dengan: Produk Baku atau Pengurangan Produk Baku) 1.6 ☐ PPN Pasal 17E KUP (dikurangkan dengan: Produk Baku atau Pengurangan Produk Baku) III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak: Rp. 0,00 B. PPN Terutang: Rp. 0,00 C. Jumlah Tanggah: (dalam rupiah) NTPN: IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI A. PPN yang wajib dibayar kembali: Rp. 0,00 B. Jumlah Tanggah: (dalam rupiah) NTPN: V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. PPNBM yang harus dipungut sendiri B. PPNBM ekspor dan/atau dalam Masa Pajak yang sama C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (JA - VI) D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (VI - VI) F. PPNBM kurang bayar dikurangkan dengan: (dalam rupiah) NTPN: VI. KELENGKAPAN SPT ☒ Formulir 1111 A ☒ Formulir 1111 B ☒ Formulir 1111 C ☒ SSP PPN 1 lembar ☐ Surat Kuasa Khusus ☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 C1 ☒ SSP PPNBM 2 lembar ☐ ☐ ☐ KAB. BOGOR 25-11-2019 (dalam rupiah) PERNYATAAN: DENGAN MENYADARI SEPERTI INI SAYA AKAN SEGALA AKTIVITAS, SAYA, BERTAKUTAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHKAN DI ATAS BERBASTA (MIRIPAN, AMPHANYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAF. Tanda tangan: ☒ PPN Nama Jelas: HAJI SETI ☐ PPN Jabatan: DIREKTUR ☐ PPN Cap Persewaan:			No	Barang/Jasa	PPN	PPN	1	Export	0,00	0,00	2	Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	2.257.708.000,00	220.770.800,00	3	Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	4	Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	0,00	0,00	5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00	Jumlah (A 1 + (A 2 + A 3) + (A 4 + A 5))		2.257.708.000,00	220.770.800,00	B. Total Terbilang PPN		0,00	0,00	C. Jumlah Setoran Persewaan (JA + IB)		2.257.708.000,00	0,00
No	Barang/Jasa	PPN	PPN																																			
1	Export	0,00	0,00																																			
2	Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	2.257.708.000,00	220.770.800,00																																			
3	Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00	0,00																																			
4	Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	0,00	0,00																																			
5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00																																			
Jumlah (A 1 + (A 2 + A 3) + (A 4 + A 5))		2.257.708.000,00	220.770.800,00																																			
B. Total Terbilang PPN		0,00	0,00																																			
C. Jumlah Setoran Persewaan (JA + IB)		2.257.708.000,00	0,00																																			

R.1.2.2.2.2.2

Lampiran 19

SPT Masa PPN Oktober 2019 Pembetulan

[illegible]

Lampiran 20

SPT Masa PPN November 2019 Normal

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																																																							
NAMA PPN : PT SUMBER PANGAN MAMUR BERSAMA		Surat : 830401936		617 000																																																							
ALAMAT : JL. R. SOEJATI KEMUNING BUKIT BLOK F NO 08 RT 12 RW 03, KAB. BOJONEGORO		KOTA : 11 4 11 - 2019		Tgl. 01 11 19																																																							
TELEPON : 0842168 KH : 08228800890 KLU :		Periode dari 0 000		☐ Wajib PPNm																																																							
I. PENERAHAAN BARANG DAN JASA <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">A. Tentang PPN:</th> <th>0%</th> <th>1%</th> <th>11%</th> <th>12%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Dasar</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyesuaian yang PPN nya harus dipungut sendiri</td> <td>Rp</td> <td>2.790.483.825,00</td> <td></td> <td></td> <td>270.048.380,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyesuaian yang PPN nya dipungut oleh Penerima PPN</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyesuaian yang PPN nya tidak dipungut</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyesuaian yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5)</td> <td>Rp</td> <td>2.790.483.825,00</td> <td></td> <td></td> <td>270.048.380,00</td> </tr> <tr> <td>6. Tidak Terutang PPN</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. Jumlah Saldo Penerimaan (A.2 + 6)</td> <td>Rp</td> <td>2.790.483.825,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						A. Tentang PPN:		0%	1%	11%	12%	1. Dasar	Rp	0,00				2. Penyesuaian yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp	2.790.483.825,00			270.048.380,00	3. Penyesuaian yang PPN nya dipungut oleh Penerima PPN	Rp	0,00			0,00	4. Penyesuaian yang PPN nya tidak dipungut	Rp	0,00			0,00	5. Penyesuaian yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00			0,00	Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5)	Rp	2.790.483.825,00			270.048.380,00	6. Tidak Terutang PPN	Rp	0,00				7. Jumlah Saldo Penerimaan (A.2 + 6)	Rp	2.790.483.825,00			
A. Tentang PPN:		0%	1%	11%	12%																																																						
1. Dasar	Rp	0,00																																																									
2. Penyesuaian yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp	2.790.483.825,00			270.048.380,00																																																						
3. Penyesuaian yang PPN nya dipungut oleh Penerima PPN	Rp	0,00			0,00																																																						
4. Penyesuaian yang PPN nya tidak dipungut	Rp	0,00			0,00																																																						
5. Penyesuaian yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00			0,00																																																						
Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5)	Rp	2.790.483.825,00			270.048.380,00																																																						
6. Tidak Terutang PPN	Rp	0,00																																																									
7. Jumlah Saldo Penerimaan (A.2 + 6)	Rp	2.790.483.825,00																																																									
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAKURLEBIH BAYAR <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. Pajak Kewajiban yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td>Rp</td> <td>270.048.380,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN dibayar dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggungjawabkan</td> <td>Rp</td> <td>203.887.520,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau lebih bayar (A - B - C)</td> <td>Rp</td> <td>6.160.860,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan (D - E)</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>G. PPN kurang bayar dikawat tanggal 20/12/19 0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H. PPN lebih bayar pada :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. ☐ Rule 1.0 (Tidak sesuai for SPT Surat Pemberitahuan)</td> <td>2. ☐ Rule 6.2 atau</td> <td>☐ Rule 8.2 (Tidak dalam for SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>3. ☐ PKP Pasal 9 ayat (6) PPN</td> <td>4. ☐ Sisa PKP Pasal 9 ayat (6) PPN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>6. ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. ☐ Dikembalikan (Refund)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Khusus Refund untuk PKP :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Pasal 17C KUP diadukan dengan</td> <td>☐ Prosedur Biasa atau</td> <td>☐ Pengembalian Pembetulan</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17D KUP diadukan dengan</td> <td>☐ Prosedur Biasa atau</td> <td>☐ Pengembalian Pembetulan</td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 9 ayat (6) PPN diadukan dengan Pengembalian Pembetulan</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						A. Pajak Kewajiban yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp	270.048.380,00	B. PPN dibayar dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0,00	C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggungjawabkan	Rp	203.887.520,00	D. PPN kurang atau lebih bayar (A - B - C)	Rp	6.160.860,00	E. PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp	0,00	F. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan (D - E)	Rp	0,00	G. PPN kurang bayar dikawat tanggal 20/12/19 0,00			H. PPN lebih bayar pada :			1. ☐ Rule 1.0 (Tidak sesuai for SPT Surat Pemberitahuan)	2. ☐ Rule 6.2 atau	☐ Rule 8.2 (Tidak dalam for SPT Pembetulan)	3. ☐ PKP Pasal 9 ayat (6) PPN	4. ☐ Sisa PKP Pasal 9 ayat (6) PPN		5. ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	6. ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak		7. ☐ Dikembalikan (Refund)			Khusus Refund untuk PKP :			☐ Pasal 17C KUP diadukan dengan	☐ Prosedur Biasa atau	☐ Pengembalian Pembetulan	atau ☐ Pasal 17D KUP diadukan dengan	☐ Prosedur Biasa atau	☐ Pengembalian Pembetulan	atau ☐ Pasal 9 ayat (6) PPN diadukan dengan Pengembalian Pembetulan								
A. Pajak Kewajiban yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp	270.048.380,00																																																									
B. PPN dibayar dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0,00																																																									
C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggungjawabkan	Rp	203.887.520,00																																																									
D. PPN kurang atau lebih bayar (A - B - C)	Rp	6.160.860,00																																																									
E. PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp	0,00																																																									
F. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan (D - E)	Rp	0,00																																																									
G. PPN kurang bayar dikawat tanggal 20/12/19 0,00																																																											
H. PPN lebih bayar pada :																																																											
1. ☐ Rule 1.0 (Tidak sesuai for SPT Surat Pemberitahuan)	2. ☐ Rule 6.2 atau	☐ Rule 8.2 (Tidak dalam for SPT Pembetulan)																																																									
3. ☐ PKP Pasal 9 ayat (6) PPN	4. ☐ Sisa PKP Pasal 9 ayat (6) PPN																																																										
5. ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	6. ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak																																																										
7. ☐ Dikembalikan (Refund)																																																											
Khusus Refund untuk PKP :																																																											
☐ Pasal 17C KUP diadukan dengan	☐ Prosedur Biasa atau	☐ Pengembalian Pembetulan																																																									
atau ☐ Pasal 17D KUP diadukan dengan	☐ Prosedur Biasa atau	☐ Pengembalian Pembetulan																																																									
atau ☐ Pasal 9 ayat (6) PPN diadukan dengan Pengembalian Pembetulan																																																											
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Dikawat Tanggal</td> <td></td> <td>(Monev) NTPN :</td> </tr> </tbody> </table>						A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00	B. PPN Terutang	Rp	0,00	C. Dikawat Tanggal		(Monev) NTPN :																																													
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00																																																									
B. PPN Terutang	Rp	0,00																																																									
C. Dikawat Tanggal		(Monev) NTPN :																																																									
IV. PERSAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. PPN yang wajib dikawat kembali</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Dikawat Tanggal</td> <td></td> <td>(Monev) NTPN :</td> </tr> </tbody> </table>						A. PPN yang wajib dikawat kembali	Rp	0,00	B. Dikawat Tanggal		(Monev) NTPN :																																																
A. PPN yang wajib dikawat kembali	Rp	0,00																																																									
B. Dikawat Tanggal		(Monev) NTPN :																																																									
V. PAJAK PERJUALAN ATAS BARANG MEWAH <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. PPhBM yang harus dipungut sendiri</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPhBM dibayar dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C. PPhBM kurang atau lebih bayar ((A - B) x 10)</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPhBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPhBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan ((C - D) x 10)</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPhBM kurang bayar dikawat tanggal</td> <td></td> <td>(Monev) NTPN :</td> </tr> </tbody> </table>						A. PPhBM yang harus dipungut sendiri	Rp	0,00	B. PPhBM dibayar dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0,00	C. PPhBM kurang atau lebih bayar ((A - B) x 10)	Rp	0,00	D. PPhBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp	0,00	E. PPhBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan ((C - D) x 10)	Rp	0,00	F. PPhBM kurang bayar dikawat tanggal		(Monev) NTPN :																																				
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri	Rp	0,00																																																									
B. PPhBM dibayar dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp	0,00																																																									
C. PPhBM kurang atau lebih bayar ((A - B) x 10)	Rp	0,00																																																									
D. PPhBM kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibebaskan	Rp	0,00																																																									
E. PPhBM kurang atau lebih bayar karena pembetulan ((C - D) x 10)	Rp	0,00																																																									
F. PPhBM kurang bayar dikawat tanggal		(Monev) NTPN :																																																									
VI. KELENGKAPAN SPT <table border="1"> <tbody> <tr> <td>☒ Formulir 1111 A6</td> <td>☒ Formulir 1111 A2</td> <td>☒ Formulir 1111 B2</td> <td>☒ SPT PPN 1 lembar</td> <td>☐ Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td>☒ Formulir 1111 A1</td> <td>☒ Formulir 1111 B1</td> <td>☒ Formulir 1111 B5</td> <td>☒ SPT PPhBM 5 lembar</td> <td>☐ 0 lembar</td> </tr> </tbody> </table>						☒ Formulir 1111 A6	☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☒ SPT PPN 1 lembar	☐ Surat Kuasa Khusus	☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 B1	☒ Formulir 1111 B5	☒ SPT PPhBM 5 lembar	☐ 0 lembar																																												
☒ Formulir 1111 A6	☒ Formulir 1111 A2	☒ Formulir 1111 B2	☒ SPT PPN 1 lembar	☐ Surat Kuasa Khusus																																																							
☒ Formulir 1111 A1	☒ Formulir 1111 B1	☒ Formulir 1111 B5	☒ SPT PPhBM 5 lembar	☐ 0 lembar																																																							
PERNYATAAN : DENGAN MENYAHKAN SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAKU MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYKAT.																																																											
KABL: SDCM/RJD 19-12-2019 (di-monev)																																																											
Tanda tangan : ☒ PPN Nama dan Jabatan : HANISEH DIREKTUR ☐ RUSA Cap Penerimaan :																																																											

F.12.32.04

Lampiran 21

SPT Masa PPN Desember 2019 Normal

[illegible]

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran 22

SPT Tahunan Badan 2019 Normal Induk

FORMULIR		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK 2019																						
1771		PERHATIAN : SEBELUM MENULIS DATA DI BAWAH INI, BACALAH PETUNJUK PENGISIAN (1) DENGAN HURUF CETAK/OKTET DENGAN TITIK HITAM BAGI DATA "X" PADA ☐ KOTAK PILIHAN YANG BERLAKU		☐ SPT PEMBEKUTAN KE ...																						
IDENTITAS	NPWP	839461936617000																								
	NAMA WAJIB PAJAK	PT. SUMBER PANGAN MAK MUR BERGA																								
	JENIS USAHA	DAGANG ECEKARAN MAKANAN RUMAH 47249																								
	NO. TELEFON	082298998888																								
	PERIODE PEMERIKSAAN	0119 s.d. 1219																								
NEGERA DOMISILI KANTOR PRAT (Kantor BLU)																										
PEMBUKUJUAN LAPORAN KEUANGAN		☐ ORASIS ☐ ORDE AKUNTAN ☒ TELAH ORASIS																								
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK																										
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK																										
NAMA AKUNTAN PUBLIK																										
NPWP AKUNTAN PUBLIK																										
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK																										
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK																										
NAMA KONSULTAN PAJAK																										
NPWP KONSULTAN PAJAK																										
*Petegian identifikasi yang telah terisi wajib harus dicatatkan untuk pemenuhan data pada petegian (17.2)																										
A. PENGHASILAN KEMASUKAN		<table border="1"> <thead> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. PENGHASILAN NETO RISAL (Data dari Formulir 1771-1 Nomor 8 Kolom 3)</td> <td>1</td> <td>122.730.178</td> </tr> <tr> <td>2. KOMPENSASI KEHUTANAN FISKAL (Data dari Lampiran Khusus 2A, Jumlah Kolom 8)</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. PENGHASILAN KEMASUKAN PAJAK (1+2)</td> <td>3</td> <td>122.730.000</td> </tr> </tbody> </table>				(1)	(2)	(3)	1. PENGHASILAN NETO RISAL (Data dari Formulir 1771-1 Nomor 8 Kolom 3)	1	122.730.178	2. KOMPENSASI KEHUTANAN FISKAL (Data dari Lampiran Khusus 2A, Jumlah Kolom 8)	2	0	3. PENGHASILAN KEMASUKAN PAJAK (1+2)	3	122.730.000									
(1)	(2)	(3)																								
1. PENGHASILAN NETO RISAL (Data dari Formulir 1771-1 Nomor 8 Kolom 3)	1	122.730.178																								
2. KOMPENSASI KEHUTANAN FISKAL (Data dari Lampiran Khusus 2A, Jumlah Kolom 8)	2	0																								
3. PENGHASILAN KEMASUKAN PAJAK (1+2)	3	122.730.000																								
B. PPh TERUTANG		<table border="1"> <thead> <tr> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4. PPh TERUTANG (PPh) sudah ada sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Urut/urut pertama, yang tidak PPh terutang Penghasilan SPT)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Hasil X Angka 3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2) X Angka 3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. ☒ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (sederhana/terutang)</td> <td>4</td> <td>28.491.055</td> </tr> <tr> <td>5. PENGEMBALAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 26 YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TERANGKAI LALI)</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)</td> <td>6</td> <td>28.491.055</td> </tr> </tbody> </table>				(4)	(5)	(6)	4. PPh TERUTANG (PPh) sudah ada sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Urut/urut pertama, yang tidak PPh terutang Penghasilan SPT)			a. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Hasil X Angka 3			b. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2) X Angka 3			c. ☒ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (sederhana/terutang)	4	28.491.055	5. PENGEMBALAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 26 YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TERANGKAI LALI)	5	0	6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	6	28.491.055
(4)	(5)	(6)																								
4. PPh TERUTANG (PPh) sudah ada sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Urut/urut pertama, yang tidak PPh terutang Penghasilan SPT)																										
a. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Hasil X Angka 3																										
b. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2) X Angka 3																										
c. ☒ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (sederhana/terutang)	4	28.491.055																								
5. PENGEMBALAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 26 YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TERANGKAI LALI)	5	0																								
6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	6	28.491.055																								
C. KREDIT PAJAK		<table border="1"> <thead> <tr> <th>(7)</th> <th>(8)</th> <th>(9)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (PPh yang Belum Lunas Negatif)</td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Data dari Formulir 1771-1 Jumlah Kolom 5)</td> <td>8a</td> <td>435.856</td> </tr> <tr> <td>b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Data dari Lampiran Khusus 2A, Jumlah Kolom 7)</td> <td>8b</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>c. JUMLAH (8a + 8b)</td> <td>8c</td> <td>435.856</td> </tr> <tr> <td>9. a. ☒ PPh YANG HARUS DIBAYAR SEBELUM b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR / DIPUNGUT (9 - 7 - 8c)</td> <td>9</td> <td>20.855.210</td> </tr> <tr> <td>10. PPh YANG DIBAYAR SEBELUM a. PPh Ps. 25 SULARAH b. STP-PPh Ps. 25 (Hasil Pokok Pajak) c. PPh Ps. 25 AYAT (B) / FISKAL LUAR NEGERI d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)</td> <td>10a 10b 10c 10d</td> <td>20.000.938 0 0 20.000.938</td> </tr> </tbody> </table>				(7)	(8)	(9)	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (PPh yang Belum Lunas Negatif)	7	0	8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Data dari Formulir 1771-1 Jumlah Kolom 5)	8a	435.856	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Data dari Lampiran Khusus 2A, Jumlah Kolom 7)	8b	0	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	435.856	9. a. ☒ PPh YANG HARUS DIBAYAR SEBELUM b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR / DIPUNGUT (9 - 7 - 8c)	9	20.855.210	10. PPh YANG DIBAYAR SEBELUM a. PPh Ps. 25 SULARAH b. STP-PPh Ps. 25 (Hasil Pokok Pajak) c. PPh Ps. 25 AYAT (B) / FISKAL LUAR NEGERI d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10a 10b 10c 10d	20.000.938 0 0 20.000.938
(7)	(8)	(9)																								
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (PPh yang Belum Lunas Negatif)	7	0																								
8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Data dari Formulir 1771-1 Jumlah Kolom 5)	8a	435.856																								
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Data dari Lampiran Khusus 2A, Jumlah Kolom 7)	8b	0																								
c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	435.856																								
9. a. ☒ PPh YANG HARUS DIBAYAR SEBELUM b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR / DIPUNGUT (9 - 7 - 8c)	9	20.855.210																								
10. PPh YANG DIBAYAR SEBELUM a. PPh Ps. 25 SULARAH b. STP-PPh Ps. 25 (Hasil Pokok Pajak) c. PPh Ps. 25 AYAT (B) / FISKAL LUAR NEGERI d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10a 10b 10c 10d	20.000.938 0 0 20.000.938																								
D. PPh KURANG LEBIH BAYAR		<table border="1"> <thead> <tr> <th>(11)</th> <th>(12)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11. a. ☒ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 26) b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 26a) (9 - 10d)</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a. DISEKOR TUNGGAL b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b. DIBEHOR a. ☐ DISEKOR TUNGGAL b. ☐ DIBEHOR Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : ☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				(11)	(12)	11. a. ☒ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 26) b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 26a) (9 - 10d)	11	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a. DISEKOR TUNGGAL b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b. DIBEHOR a. ☐ DISEKOR TUNGGAL b. ☐ DIBEHOR Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : ☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)																
(11)	(12)																									
11. a. ☒ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 26) b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 26a) (9 - 10d)	11																									
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a. DISEKOR TUNGGAL b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b. DIBEHOR a. ☐ DISEKOR TUNGGAL b. ☐ DIBEHOR Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : ☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)																										

F.1.1.32.14

Lampiran 23

SPT Tahunan Badan 2019 Normal Lampiran HPP

1771 - II		LAMPIRAN - II		TAHUN PAJAK	
KORPORASI BERKANTOR DI LUAR NEGERI		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		2019	
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA					
NPWP	0304519305517040	NAMA WAJIB PAJAK	P.T. CUMBERBES PANGAN MUKA TERES		
PROSES PENJUALAN	0119011310				
KD	PERIKOM	HARGA POKOK PENJUALAN (Rp/lot)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rp/lot)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp/lot)	Jumlah (Rp/lot)
1	PEMBELIAN BAHAN BAKAR DAN GAS	30.115.004.719	0	0	30.115.004.719
2	GAS LUNAS, BOKAL, CERTIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSO	0	1.204.181.360	0	1.204.181.360
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4	BIAYA PENYUTUTAN DAN AMORTISASI	0	101.020.000	0	101.020.000
5	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6	BIAYA BUNGA PRUKAM	0	0	0	0
7	BIAYA BEHLUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8	BIAYA RUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9	BIAYA KOTALITI	0	0	0	0
10	BIAYA PEMASARAN/PROSPEKSI	0	0	0	0
11	BIAYA LAINNYA	34.290.200	75.300.000	0	109.590.200
12	PERSEDIAAN AWAL	3.020.377.434	0	0	3.020.377.434
13	PERSEDIAAN AKHIR (-)	4.637.774.200	0	0	4.637.774.200
Jumlah 1 s.d. 12 dikurangi 13		32.202.577.845	1.401.484.880	0	33.604.062.685

Catatan:

- Monor 1 untuk penjualan barang di pasaran (barang dagangan, untuk diperjualbelikan) kecuali atas jasa badan, satuan persentase dan barang jadi.
- Monor 7 termasuk manajemen fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.
- Monor 11 dan dengan totalnya yang tidak termasuk dalam periode 1 s.d. 10.
- Monor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang dan total pendapatan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri dan total pendapatan awal dan akhir produksi barang dagangan yang terdapat pada tambahan barang jadi.

11.20.24

Lampiran 24

SPT Tahunan Badan 2019 Induk Pembetulan

[illegible]

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran 26

Rincian Data Pembelian yang Belum Dilaporkan dari SP2DK

Masa	NPWP Pengad	Nama Pengad	NPWP Penbel	Nama Penbel	Kd Jnsk	Status	No Faktur	Tgl Faktur	OPP	PPN
1		PT ARTA SOGA CEM	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		05/03/2019	1.261.575	126.158
		PT WYD	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		06/03/2019	1.878.902	187.890
		PT ULTRALAYA MILK	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		13/03/2019	5.102.566	510.260
2		PT PUTRA IKAN HIAS	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		01/02/2019	8.873.838	887.384
		PT POCOR INDONESIA	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		04/03/2019	7.199.760	719.976
		PT GACING PURI PT	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		14/03/2019	176.182	17.618
		PT PUTRA IKAN HIAS	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		15/03/2019	8.968.182	896.816
		PT MANOHARA ASD	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		16/03/2019	8.675.449	867.545
		PT PINUS MERAH AB	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		22/03/2019	21.373.464	2.137.346
									58.488.673	5.848.667
3		PT ARTA SOGA CEM	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		05/03/2019	1.261.575	126.158
		PT WYD	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		06/03/2019	2.818.500	281.850
		PT ULTRALAYA MILK	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		13/03/2019	5.564.547	556.455
		PT PASTRATA GUAN	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		16/03/2019	82.910	8.291
		PT ARTA SOGA CEM	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		16/03/2019	1.452.363	145.236
		PT WYD	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		16/03/2019	8.061.338	806.134
		PT PINUS MERAH AB	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		25/03/2019	13.155.237	1.315.523
		PT BORNYTA CITRA	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		26/03/2019	14.068.681	1.406.688
		PT PINUS MERAH AB	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		26/03/2019	18.413.945	1.841.385
		PT ARTA SOGA CEM	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		31/03/2019	28.138.949	2.813.895
									98.038.034	9.803.803
4		CV PUNGAK PANGAJ	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		02/04/2019	36.781.140	3.678.114
		PT GACING PURI PT	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		08/04/2019	188.910	18.891
		PT PINUS MERAH AB	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		08/04/2019	15.478.930	1.547.893
		PT PUTRA IKAN HIAS	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		08/04/2019	11.045.496	1.104.546
		PT ARTA SOGA CEM	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		10/04/2019	379.047	37.905
		CV CAHAYA SURYA	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		16/04/2019	3.360.000	336.000
		CV CAHAYA SURYA	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		18/04/2019	1.727.273	172.727
		PT WYD	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		22/04/2019	5.061.337	506.134
		CV MRS KUMANG	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		22/04/2019	28.144.548	2.814.498
		PT SUKSES MAKJUR	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		23/04/2019	2.132.727	213.273
		CV PUNGAK PANGAJ	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		30/04/2019	34.863.880	3.486.388
		PT PINUS MERAH AB	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		30/04/2019	3.878.501	387.850
		PT SUKSES MAKJUR	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		30/04/2019	2.132.727	213.273
		PT PINUS MERAH AB	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		30/04/2019	3.878.501	387.850
									147.340.954	14.734.095
5		PT SUKSES SARANA	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		11/05/2019	8.454.545	845.495
		PT ARTA SOGA CEM	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		13/05/2019	1.752.072	175.207
		PT GACING PURI PT	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		16/05/2019	28.232.020	2.823.282
		PT PANIH MITRA ANJ	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		16/05/2019	58.586.593	5.858.659
		PT GERBANG BCR	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		17/05/2019	12.089.760	1.208.976
		PT ARTA SOGA CEM	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		20/05/2019	1.752.072	175.207
		PT ARTA SOGA CEM	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		24/05/2019	8.220.980	822.985
		PT WYD	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		26/05/2019	8.061.338	806.134
		PT PANIH MITRA ANJ	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		26/05/2019	19.359.093	1.935.909
		PT PANIH MITRA ANJ	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		27/05/2019	13.480.884	1.348.088
									155.460.767	15.546.077
6		PT CIPITA NAGA SEM	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		14/06/2019	368.078	36.838
		PT KURNIA WUJAYA	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		19/06/2019	1.785.811	178.581
		PT WYD	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		22/06/2019	5.061.338	506.134
									7.125.229	712.523
7		CV KARYA ABADI SC	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		04/07/2019	1.114.908	111.491
		PT WYD	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		06/07/2019	5.061.337	506.134
		PT ARTA SOGA CEM	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		11/07/2019	908.181	90.818
		PT SO GOOD FOOD	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		18/07/2019	1.379.424	137.942
		PT SO GOOD FOOD	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		18/07/2019	123.978	12.388
		PT WYD	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		20/07/2019	7.382.438	738.244
		PT KARUNIA CISTRIS	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		20/07/2019	9.327.199	932.720
		PT GALAXY INDAH JA	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		24/07/2019	39.492.260	3.949.225
		CV MRS KUMANG	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		25/07/2019	12.829.545	1.282.985
		CV PUNGAK PANGAJ	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		26/07/2019	18.896.492	1.889.492
		CV PUNGAK PANGAJ	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		26/07/2019	14.118.660	1.411.666
		PT WYD	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		27/07/2019	12.473.773	1.247.377
		CV MRS KUMANG	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		27/07/2019	29.882.273	2.988.227
		CV PUNGAK PANGAJ	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		29/07/2019	33.385.670	3.338.567
		PT PINUS MERAH AB	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		30/07/2019	21.731.286	2.173.129
		PT ARTA SOGA CEM	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		31/07/2019	7.272	727
									38.799.808	3.879.981
									207.390.492	20.739.049
18		CV MRS KUMANG	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		05/10/2019	28.083.637	2.808.364
		CV MRS KUMANG	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		12/10/2019	14.908.182	1.490.818
		PT PINUS MERAH AB	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		13/10/2019	17.225.748	1.722.575
		CV MRS KUMANG	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		13/10/2019	28.601.361	2.860.136
		PT PINUS MERAH AB	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		17/10/2019	12.199.822	1.219.982
		CV PUNGAK PANGAJ	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		17/10/2019	31.563.840	3.156.384
		PT ARTA SOGA CEM	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		21/10/2019	8.727	873
		PT ARTA SOGA CEM	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		21/10/2019	8.727	873
		PT MANOHARA ASD	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		22/10/2019	4.082.929	408.292
		PT PINUS MERAH AB	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		22/10/2019	12.481.832	1.248.183
		CV MRS KUMANG	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		22/10/2019	29.415.907	2.941.591
		ME NLA MASA GL	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		23/10/2019	8.545.485	854.545
		CV PUNGAK PANGAJ	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		24/10/2019	34.095.610	3.409.561
		CV CAHAYA SURYA	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		24/10/2019	840.909	84.091
		CV MRS KUMANG	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		25/10/2019	28.583.835	2.858.384
		PT ARTA SOGA CEM	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		25/10/2019	8.727	873
		CV KARYA ABADI SC	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		26/10/2019	54.380.146	5.438.015
		PT GALAXY INDAH JA	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		26/10/2019	18.252.945	1.825.295
		CV MRS KUMANG	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		26/10/2019	15.138.182	1.513.818
		CV PUNGAK PANGAJ	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		26/10/2019	34.382.040	3.438.204
		CV MRS KUMANG	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		30/10/2019	28.870.906	2.887.081
		PT SURTA SEMAR BCS	33441930617000MSE	PANGAN MAKJUR DER	01	0		30/10/2019	5.488.040	548.040
									398.810.643	39.880.643

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran 27

Rincian Data Pembelian yang Belum Dilaporkan dari WP

Meas	NPWP Penjual	No Faktur	Nama Penjual	NPWP Pembeli	Nama Pembeli	Tgl Faktur	DPP	PPN
1			PT ARTA BOGA CEM	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	05/03/2015	1.261.575	126.158
			PT WIRYO	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	09/03/2015	3.010.502	301.050
			PT ULTRAJAYA NIK	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	13/03/2015	5.100.595	510.100
							18.182.672	1.818.267
2			PT PUTRA KARI HAS	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	01/03/2015	5.613.638	561.364
			PT POCOH BUDONER	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	04/03/2015	7.199.765	719.976
			PT GADING PURI PE	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	14/03/2015	1.776.182	177.618
			PT PUTRA KARI HAS	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	15/03/2015	5.665.952	566.595
			PT MANOHARA ASH	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	16/03/2015	8.615.445	861.545
			PT PINUS MERAH AS	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	22/03/2015	21.313.382	2.131.338
							56.486.873	5.648.667
3			PT ARTA BOGA CEM	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	06/03/2015	1.261.575	126.158
			PT WIRYO	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	09/03/2015	3.010.502	301.050
			PT ULTRAJAYA NIK	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	13/03/2015	5.104.547	510.455
			PT FASTRATA BAHU	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	15/03/2015	873.918	87.392
			PT ARTA BOGA CEM	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	16/03/2015	5.452.363	545.236
			PT WIRYO	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	18/03/2015	5.091.336	509.133
			PT PINUS MERAH AS	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	25/03/2015	13.155.227	1.315.223
			PT BERANTA LITRA	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	26/03/2015	14.065.681	1.406.681
			PT PINUS MERAH AS	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	29/03/2015	19.413.945	1.941.395
			PT ARTA BOGA CEM	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	31/03/2015	20.138.548	2.013.852
							89.838.054	8.983.803
4			CV PUNCAK PANGA	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	02/04/2015	35.791.146	3.579.134
			PT GADING PURI PE	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	08/04/2015	1.681.918	168.192
			PT PINUS MERAH AS	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	08/04/2015	15.478.936	1.547.893
			PT PUTRA KARI HAS	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	08/04/2015	11.085.335	1.108.535
			PT ARTA BOGA CEM	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	10/04/2015	373.047	37.305
			CV CAHAYA SURYA	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	18/04/2015	3.350.016	335.000
			CV CAHAYA SURYA	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	18/04/2015	1.127.273	112.727
			PT WIRYO	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	22/04/2015	5.091.337	509.134
			CV MIKI KURNIG	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	22/04/2015	28.144.546	2.814.456
			PT BUKES SARANA	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	23/04/2015	1.132.727	113.273
			CV PUNCAK PANGA	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	23/04/2015	34.683.886	3.468.386
			PT PINUS MERAH AS	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	23/04/2015	3.010.502	301.050
							141.789.726	14.178.973
5			PT BUKES SARANA	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	11/05/2015	6.454.545	645.455
			PT ARTA BOGA CEM	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	13/05/2015	1.152.872	115.287
			PT GADING PURI PE	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	16/05/2015	28.732.826	2.873.282
			PT PALMITRA AND	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	16/05/2015	55.586.583	5.558.653
			PT BERKARANG BER	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	17/05/2015	12.099.786	1.209.978
			PT ARTA BOGA CEM	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	20/05/2015	1.152.872	115.287
			PT ARTA BOGA CEM	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	24/05/2015	8.229.982	822.998
			PT WIRYO	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	25/05/2015	5.091.336	509.134
			PT PALMITRA AND	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	25/05/2015	15.750.051	1.575.005
			PT PALMITRA AND	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	27/05/2015	11.490.864	1.149.086
							155.596.767	15.559.877
6			PT CIPTA NIAGA SE	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	14/06/2015	268.076	26.807
			PT KURNIA WILAJA	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	19/06/2015	1.185.811	118.581
			PT WIRYO	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	22/06/2015	5.091.336	509.133
							7.185.223	718.592
7			CV KARYA ARADI SE	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	04/07/2015	1.114.908	111.491
			PT WIRYO	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	06/07/2015	5.091.337	509.132
			PT ARTA BOGA CEM	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	11/07/2015	939.991	93.998
			PT SO GOO DO FOOD	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	18/07/2015	1.715.424	171.542
			PT SO GOO DO FOOD	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	18/07/2015	1.239.979	123.998
			PT WIRYO	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	20/07/2015	7.362.439	736.243
			PT KARUTJA DISTRI	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	20/07/2015	3.327.795	332.787
			PT GATIXY INDAH	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	24/07/2015	39.492.746	3.949.725
			CV MIKI KURNIG	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	25/07/2015	12.829.545	1.282.955
			CV PUNCAK PANGA	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	26/07/2015	16.896.483	1.689.643
8			CV PUNCAK PANGA	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	26/07/2015	34.118.686	3.411.866
			PT WIRYO	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	27/07/2015	12.473.773	1.247.377
			CV MIKI KURNIG	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	27/07/2015	29.862.273	2.986.227
			CV PUNCAK PANGA	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	28/07/2015	23.364.368	2.336.437
							237.201.421	23.722.142
9			CV MIKI KURNIG	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	05/10/2015	29.593.637	2.959.364
			CV MIKI KURNIG	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	17/10/2015	14.768.182	1.476.818
			PT PINUS MERAH AS	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	13/10/2015	17.225.746	1.722.575
			CV MIKI KURNIG	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	13/10/2015	29.631.361	2.963.136
			PT PINUS MERAH AS	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	17/10/2015	12.100.632	1.210.662
			CV PUNCAK PANGA	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	17/10/2015	31.605.848	3.160.584
			PT ARTA BOGA CEM	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	21/10/2015	8.727	873
			PT ARTA BOGA CEM	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	21/10/2015	67.272	6.727
			PT MANOHARA ASH	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	22/10/2015	4.082.300	408.282
			PT PINUS MERAH AS	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	22/10/2015	12.481.832	1.248.183
10			CV MIKI KURNIG	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	23/10/2015	29.415.367	2.941.201
			ME RILIA WISODI	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	23/10/2015	6.545.454	654.545
			CV PUNCAK PANGA	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	24/10/2015	24.098.610	2.409.861
			CV CAHAYA SURYA	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	24/10/2015	862.905	86.291
			CV MIKI KURNIG	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	25/10/2015	29.563.636	2.956.364
			PT ARTA BOGA CEM	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	25/10/2015	8.727	873
			CV KARYA ARADI SE	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	26/10/2015	64.760.146	6.476.045
			PT GATIXY INDAH	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	26/10/2015	18.762.345	1.876.295
			CV MIKI KURNIG	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	26/10/2015	15.138.182	1.513.818
			CV PUNCAK PANGA	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	28/10/2015	34.382.045	3.438.204
11			CV MIKI KURNIG	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	30/10/2015	29.670.368	2.967.091
			PT SURYA SINAR BE	339461936617000	VEER PANGAN MAKMUR BER	30/10/2015	5.281.032	528.032
							299.816.643	29.981.664

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran 28
Surat Tagihan Pajak SPT Masa PPN tahun 2019

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA		
Nomor : 01800/13719/017/03		
Masa Tahun Pajak : Januari 2019		
Tanggal Penetapan : 3 Juli 2023		
Tanggal Jatuh Tempo : 2 Agustus 2023		

Nama Wajib Pajak/PPN : P [REDACTED]
NPWP : 9 [REDACTED]

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1.	Pajak harus dibayar/tagih kembali		0
2.	Tolak dibayar		
3.	Kurang dibayar (1-2)		0
4.	Sanksi administratif :		
a.	Denda Pasal 7 KUP		0
b.	Bunga Pasal 8 (2a) KUP		65.000
c.	Bunga Pasal 9 (2a) KUP		0
d.	Bunga Pasal 14 (2) KUP		0
e.	Denda Pasal 14 (3) KUP		0
f.	Pasal 14 (1) huruf d		0
g.	Pasal 14 (1) huruf e		0
h.	Jumlah denda (a+f+g.2)		0
i.	Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e.3)		65.000
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.i)		65.000

Terbilang : Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA		
Nomor : 01800/13719/017/03		
Masa Tahun Pajak : Februari 2019		
Tanggal Penetapan : 3 Juli 2023		
Tanggal Jatuh Tempo : 2 Agustus 2023		

1. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang atas pemeriksaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak :
Nama Wajib Pajak/PPN : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]

2. Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1.	Pajak harus dibayar/tagih kembali		0
2.	Tolak dibayar		
3.	Kurang dibayar (1-2)		0
4.	Sanksi administratif :		
a.	Denda Pasal 7 KUP setelah menerima Penetapan Surat Perintah Pajak (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		0
b.	Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas penundaan SPT Masa PPN yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar		35.956
c.	Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas penundaan atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak		0
d.	Bunga Pasal 14 (2) KUP atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung		0
e.	Denda Pasal 14 (3) KUP		0
f.	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau tidak membuat faktur pajak		0
g.	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengikhtisarkan faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP		0
h.	Jumlah denda (a+f+g.2)		0
i.	Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e.3)		35.956
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.i)		35.956

Terbilang : Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA	
Nomor	: 01888/107/196/17/23
Masa/Tahun Pajak	: Maret 2019
Tanggal Penetapan	: 29 Agustus 2023
Tanggal Jatuh Tempo	: 28 September 2023

Nama Wajib Pajak/PPK : P
NPWP : 0

No	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1.	Pajak harus dibayar/ditagi kembali		0
2.	Telah dibayar		
3.	Kurang dibayar (1-2)		0
4.	Sanksi administratif :		
a.	Denda Pasal 7 KUP		0
b.	Bunga Pasal 8 (2a) KUP		24.853
c.	Bunga Pasal 9 (2a) KUP		0
d.	Bunga Pasal 14 (2) KUP		0
e.	Denda Pasal 14 (4) KUP		0
e.1	Pasal 14 (1) huruf d		0
e.2	Pasal 14 (1) huruf e		0
e.3	Jumlah denda (e.1+e.2)		0
f.	Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e.3)		24.853
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.f)		24.853
Terbilang : Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah			

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA	
Nomor	: 01883/107/196/17/23
Masa/Tahun Pajak	: April 2019
Tanggal Penetapan	: 3 Juli 2023
Tanggal Jatuh Tempo	: 2 Agustus 2023

Nama Wajib Pajak/PPK : P
NPWP : 0

No	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1.	Pajak harus dibayar/ditagi kembali		0
2.	Telah dibayar		
3.	Kurang dibayar (1-2)		0
4.	Sanksi administratif :		
a.	Denda Pasal 7 KUP		0
b.	Bunga Pasal 8 (2a) KUP		16.349.879
c.	Bunga Pasal 9 (2a) KUP		0
d.	Bunga Pasal 14 (2) KUP		0
e.	Denda Pasal 14 (4) KUP		0
e.1	Pasal 14 (1) huruf d		0
e.2	Pasal 14 (1) huruf e		0
e.3	Jumlah denda (e.1+e.2)		0
f.	Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e.3)		16.349.879
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.f)		16.349.879
Terbilang : Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah			

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA	
Nomor	: 01559/107/19/617/23
Masa/Tahun Pajak	: Mei 2019
Tanggal Penerbitan	: 29 Agustus 2023
Tanggal Jatuh Tempo	: 28 September 2023

Nama Wajib Pajak/PKP : XXXXXXXXXXXX
 NPWP : XXXXXXXXXX

No	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1.	Pajak harus dibayar/dibagi kembali		0
2.	Telah dibayar		
3.	Kurang dibayar (1-2)		0
4.	Sanksi administratif :		
a.	Denda Pasal 7 KUP		0
b.	Bunga Pasal 8 (2a) KUP		24.931
c.	Bunga Pasal 9 (2a) KUP		0
d.	Bunga Pasal 14 (3) KUP		0
e.	Denda Pasal 14 (4) KUP		0
e.1	Pasal 14 (1) huruf d		0
e.2	Pasal 14 (1) huruf e		0
e.3	Jumlah denda (e.1+e.2)		0
f.	Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e.3)		24.931
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.f)		24.931
Terbilang : Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah			

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA	
Nomor	: 0165/107/19/617/23
Masa/Tahun Pajak	: Juli 2019
Tanggal Penerbitan	: 3 Juli 2023
Tanggal Jatuh Tempo	: 2 Agustus 2023

Nama Wajib Pajak/PKP : P XXXXXXXXXXXX
 NPWP : R XXXXXXXXXX

No	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1.	Pajak harus dibayar/dibagi kembali		0
2.	Telah dibayar		
3.	Kurang dibayar (1-2)		0
4.	Sanksi administratif :		
a.	Denda Pasal 7 KUP		0
b.	Bunga Pasal 8 (2a) KUP		125.719
c.	Bunga Pasal 9 (2a) KUP		0
d.	Bunga Pasal 14 (3) KUP		0
e.	Denda Pasal 14 (4) KUP		0
e.1	Pasal 14 (1) huruf d		0
e.2	Pasal 14 (1) huruf e		0
e.3	Jumlah denda (e.1+e.2)		0
f.	Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e.3)		125.719
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.f)		125.719
Terbilang : Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah			

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA	
Nomor	: 01554/107/1961723
Masa/Tahun Pajak	: Agustus 2019
Tanggal Penetapan	: 3 Juli 2023
Tanggal Jatuh Tempo	: 2 Agustus 2023

Nama Wajib Pajak/PKP : P [REDACTED]
NPWP : 5 [REDACTED]

No	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1.	Pajak harus dibayar/tagih kembali		0
2.	Telah dibayar		
3.	Kurang dibayar (1-2)		0
4.	Sanksi administratif :		
a.	Denda Pasal 7 KUP		0
b.	Bunga Pasal 8 (2a) KUP		7,184,125
c.	Bunga Pasal 9 (2a) KUP		0
d.	Bunga Pasal 14 (3) KUP		0
e.	Denda Pasal 14 (4) KUP		0
e.1	Pasal 14 (1) huruf d		0
e.2	Pasal 14 (1) huruf e		0
e.3	Jumlah denda (e.1+e.2)		0
f.	Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e.3)		7,184,125
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.f)		7,184,125
Terbilang : Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah			

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA	
Nomor	: 01552/107/1961723
Masa/Tahun Pajak	: Oktober 2019
Tanggal Penetapan	: 3 Juli 2023
Tanggal Jatuh Tempo	: 2 Agustus 2023

Nama Wajib Pajak/PKP : PT [REDACTED]
NPWP : 83 [REDACTED]

No	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1.	Pajak harus dibayar/tagih kembali		0
2.	Telah dibayar		
3.	Kurang dibayar (1-2)		0
4.	Sanksi administratif :		
a.	Denda Pasal 7 KUP		0
b.	Bunga Pasal 8 (2a) KUP		512,182
c.	Bunga Pasal 9 (2a) KUP		0
d.	Bunga Pasal 14 (3) KUP		0
e.	Denda Pasal 14 (4) KUP		0
e.1	Pasal 14 (1) huruf d		0
e.2	Pasal 14 (1) huruf e		0
e.3	Jumlah denda (e.1+e.2)		0
f.	Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e.3)		512,182
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.f)		512,182
Terbilang : Lima Ratus Dua Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah			

Lampiran 29

Surat Tagihan Pajak SPT Tahunan Badan tahun 2019

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO SELATAN

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN			
Nomor : 00254/106/198/17/23	Tanggal Penerbitan : 3 Juli 2023		
Masa/Tahun Pajak : 2019	Tanggal Jatuh Tempo : 2 Agustus 2023		
1. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan: Nama Wajib Pajak/PT. SU [REDACTED] NPWP : [REDACTED]			
2. Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Angsuran PPh tahun berjalan/angsuran pokok pajak/pemutihan pokok pajak/pokok pajak yang harus dibayar	Rp/US\$ ⁽¹⁾		
2. Telah dibayar	Rp/US\$ ⁽¹⁾		
3. Kuang dibayar (3-2)	Rp/US\$ ⁽¹⁾ 0		
4. Sanksi administratif :	Rp/US\$ ⁽¹⁾		
a. Bunga Pasal 7 Undang-Undang No 6 Tahun 1960 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (KUP) atas keterlambatan Penyetoran SPT Tahunan	Rp/US\$ ⁽¹⁾ 0		
b. Bunga Pasal 8(2) KUP atas pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp/US\$ ⁽¹⁾ 2.215.899		
c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal 26 yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp/US\$ ⁽¹⁾ 0		
d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terdapat pada suatu saat atau masa pajak	Rp/US\$ ⁽¹⁾ 0		
e. Bunga Pasal 9(2b) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran SPT Tahunan	Rp/US\$ ⁽¹⁾ 0		
f. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, atau atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung	Rp/US\$ ⁽¹⁾ 0		
g. Bunga Pasal 19 (2) KUP Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan	Rp/US\$ ⁽¹⁾ 0		
h. Bunga Pasal 19(3) KUP Dalam hal Wajib Pajak yang diperbolehkan menunda pembayaran SPT Tahunan, atas kekurangan pembayaran pajak akibat pengurangan pajak sementara pajak terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang	Rp/US\$ ⁽¹⁾ 0		
i. Jumlah sanksi administratif (a+b+c+d+e+f+g+h)	Rp/US\$ ⁽¹⁾ 2.215.899		
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.i)	Rp/US\$ ⁽¹⁾ 2.215.899		

Terbilang : Dua Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Kopade : PT. SU [REDACTED]



(1) Dasar yang tidak berlaku